

Majalah Sabili Dari Orde Baru Hingga Reformasi (1985-2000)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)



OLEH:

IRHAS FANSURI MURSAL
2004/48629

JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang**

**MAJALAH SUARA SOSIALIS;
NYALA DAN PADAMNYA BINTANG MERAH
1950-1960**

Nama : Yanto Supriadi
BP/ NIM : 2004/ 48636
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu-Ilmu Sosial

Padang, Februari 2011

TIM PENGUJI

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Hendra Naldi, S.S. M Hum
Sekretaris	: Eka Vidya Putra, S.Sos, M.Si
Anggota	: Drs. Zul Asri, M.Hum
Anggota	: Drs. Etmi Hardi, M. Hum
Anggota	: Abdul Salam, Sag. M Hum

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Majalah Suara Sosialis; Nyala dan Padamnya Bintang Merah 1950-1960
Nama : Yanto Supriadi
NIM : 48636
Jurusan : Pendidikan Sejarah
Fakultas : Ilmu-Ilmu Sosial

Padang, 2011

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Hendra Naldi, SS. M Hum
NIP. 196909301996031001

Eka Vidya Putra, S.Sos, M.Si
NIP.

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Hendra Naldi, SS. M. Hum
NIP. 196909301996031001

“Seandainya aku boleh memilih, biarlah aku menjadi bintang atau bulan yang tidak angkuh ketika bertakhta dan tidak mengeluh ketika terbenam. Biarlah aku menjadi sang fajar yang gigih mengusir kelam, namun rela menyingkir untuk memberi tempat bagi sang yang lebih cemerlang.”

(Dari Buku Detik-Detik Terakhir Kehidupan Rasulullah)

Ya Allah.. Ya... Robbi

Kutundukkan hatiku untuk bersujud menghadap-Mu

Mensyukuri segala limpahan rahmat dan karunia-Mu

Hari ini setitik kebahagiaan telah kuraih

Sekeping cita dan harapan telah kudapat

Namun perjalanan masih panjang dan perjuangan belum usai

Semoga rahmat ini menjadi awal bagi keberhasilan di masa yang akan datang.

Karya ini Kupersembahkan Buat Orang Terkasih

Ibu dan Papa

Tetesan Keringat, kasih sayang, dan pengorbananmu selalu menyertai setiap langkahku, peluhmu yang mengucur deras kuteguk demi asa dan cita-cita, namun semua itu tak akan bisa kuganti.

Kini... Hanya secuil hasil yang mampu kupersembahkan kepadamu.

Mudah-mudahan Irhas bisa membahagiakan Ibu dan Papa di hari yang akan datang.

Buat Adik-adikku

Tia(cicil,, moga PL mu lancar n cita-citamu tercapai), **Ima** (cima,,tetap semangat yaa, ni baru awal,, moga kuliahmu lancar dan dapat nilai yang terbaik) dan **Aini** (cigin,,tetap rajin yaa... moga terus dapat juara kelas...) dan buat semua adik-adikku jadilah anak yang berbakti dan kebanggaan orang tua.

Buat kakak dan adik sepupuku

Buat demon dan nia,, moga cita-citamu tercapai.

Buat Seseorang ,, bunga impian dalam hatiku,, yang selalu membangunkanku di subuh buta,
”Bang bangun, sholat & lanjutkan skripsinya “you are insipirasion” semoga Allah selalu melindunginya.

Buat....

Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Teman- teman seperjuangan yang memberikan warna dalam kehidupan menjadikan memori indah dalam relung hati yang paling dalam. “YAKUSA”

Buat....

Bapak Hendra Naldi, S.S. M Hum dan Bapak Abdul Salam Sag, SS.
, terima kasih atas kesediaannya tuk meluangkan waktu membimbing dan berbagi ilmu serta berdiskusi dengan diri ini, terimakasih atas
, banyak hal yang bisa saya ambil dari ini semua..

Ibuk Dr.Siti Fatimah.M.Pd.M.Hum.

Drs. Zul Asri, M.Hum, Drs. Etmi Hardi, M.Hum, yang tlah berkenan hadir diruang sidang dan memberikan masukan serta mendiskusikan tentang tulisan ini...

Seluruh staf Pengajar Jurusan Sejarah & Jurusan Sosiologi, TU jurusan terutama da Sam terima kasih atas bantuan, diskusi, informasi, serta nasehat dan arahan yang diberikan pada saya

Buat....

FORAHMI (Forum Alumni HMI Minang) kakanda-kakanda yang Membimbing dalam penelitian di Jakarta. Meluangkan waktu bersilaturahmi dan memberikan informasi sehingga mempermudah dalam pencarian data untuk kelancaran penelitian ini. Keberadaan Sekretariat FORAHMI begitu dirasakan oleh adek-adek kanda disaat terdampar di pulau seberang sumatera thanks..

Buat Sahabat-sahabatku yang teristimewa...

Seluruh angkatan 01,02,03,04,05,06,07 jurusan sejarah dan sosiologi *dak sabuik namo dak sabuik gala do panuah karateh ko' ditulisan disiko* , jajaran pengurus HMJ Sejarah 07/08 yang selalu mendampingi, pengurus KOPMA UNP 07/08, jajaran pengurus BPL 08/09, Jajaran pengurus HMI Cabang Padang 09/10, Jajaran Pengurus HMI Badko SUMBAR dan keluarga kecilku, rumah keduaku tempat limpahan kasih sayang, Komisariatku selalu buatku bangga. semua yang telah berperan dalam perjalanan ini... thanks for all.....

”Ketika

ingin tetap meneruskan hidup berarti harus siap untuk disakiti dan menyakiti, ku persembahkan juga tulisan ini buat orang2 yg pernah aku sakiti dan menyakiti diriku, jangan pernah ada dendam dan jangan pernah ada niat tuk memutuskn silaturahmi...”

Idealisme

adalah kekayaan terakhir yang dimiliki oleh anak muda...

Petualangan

belum berakhir.....

You have to endure caterpillars if you want to see butterflies.

Anda harus tahan terhadap ulat jika ingin dapat melihat kupu-kupu.

(Antoine De Saint)

Only the man who is in the truth is a free man.

Hanya orang yang berada dalam kebenaranlah orang yang bebas.

Every dark light is followed by a light morning.

Malam yang gelap selalu diikuti pagi yang tenang.

Laughing is healthy, especially if you laugh about yourself.

Tertawa itu sehat, lebih-lebih jika mentertawakan diri sendiri

Ya Allah

Di saat karya ini tercipta, saat harapan mulai menyala

Ku mohon.. Ridhoi aku tuk meraih segenggam cita sebagai jembatan perjalanan menuju masa
depan...

Sinari aku dengan pelita-Mu

Agar jelas arah dan tujuan yang ku tempuh

Karena jalan masih panjang dan aku harus melangkah lagi...

ABSTRAK

IRHAS FANSURI : Majalah Sabili Dari Orde Baru Hingga Reformasi (1985-2000)”. Skripsi. Mahasiswa Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang (UNP). 2010.

Skripsi ini mengkaji tentang Perjalanan Majalah Sabili Dari Orde Baru Hingga Reformasi (1985-2000). Permasalahan penelitian dirumuskan: Bagaimana Perkembangan Sabili sebagai majalah yang ilegal pada masa orde baru ke majalah legal masa reformasi?

Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan perkembangan Sabili di zaman orde baru dalam kemelut pemerintahan yang otoriter dan Sabili lahir kembali pada zaman Reformasi yang terbuka.

Penelitian ini termasuk penelitian sejarah. Oleh sebab itu studi ini mengikuti metode penelitian sejarah dengan prosedur: (1) Heuristik yaitu mencari dan mengumpulkan informasi yang di peroleh dari berbagai sumber. (2) Kritik Sumber yaitu dengan melakukan pengujian terhadap keaslian dan kesahihan informasi. (3) Interpretasi yaitu menafsirkan dan menghubungkan dari data yang ada. (4) Penulisan hasil penelitian (historiografi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majalah Islam Sabili sebagai pers ilegal sekitar tahun 1985 sempat fakum beberapa waktu dan bangkit lagi tahun 1988 – 1993. Ini merupakan salah satu bentuk manifestasi bagi munculnya gerakan Islami baru Islam di Indonesia. Majalah Sabili lahir dari gerakan kelompok pengajian yang sedang berkembang di tahun 1980-an. Majalah yang Ilegal sebagai bentuk perlawanan terhadap zaman Orde Baru yang sama sekali tidak memihak pada Islam (Islam Phobia). Sabili Berkembang pesat dan diminati oleh pembaca media Islam ini ditunjukkan dengan semakin naiknya oplah setiap tahunnya. Dalam Penulisan Skripsi ini dapat dilihat beberapa perubahan Sabili dalam benruk format isi sesuai dengan zaman yang mana Sabili berkembang dalam dua zaman yaitu zaman orde baru dengan semangat dakwah Islam dan zaman reformasi yang penuh dengan kebebasan berpendapat setelah runtuh sebuah Rezim Orde Baru. Dua zaman dapat dilihat sebagai media ilegal dan media legal yang sudah mempunyai system perusahaan (PT).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, berkata rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: Majalah Sabili Dari Orde Baru Hingga Reformasi (1985-2000) dan shalawat beserta salam kepada Nabi Muhamad SAW. Skripsi disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan, arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hendranaldi SS. M.Hum, selaku pembimbing I dan bapak Salam Sag, SS selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian rasa terima kasih kepada Bapak Drs. Hendra Naldi, SS, M.Hum dan bapak Drs. Etmi Hardi, M.Hum, sebagai ketua dan sekretaris Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, dan Serta tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial UNP
2. Bapak dan Ibu Staff Pengajar Jurusan Sejarah
3. Para informan yang telah bersedia memberikan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Teristimewa kepada Kedua Orang tua, adik-adik yang telah memberikan dorongan yang sangat berarti baik moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada sahabat-sahabat penulis dan rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Sejarah dan Sosiologi-Antropologi FIS UNP. Semoga bantuan yang telah diberikan mendapat pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil dari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan bahkan banyak ditemui kesalahan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan masukan yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan dari tulisan ini. Terakhir harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi penulis sendiri untuk masa yang akan datang.

Padang, Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persembahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Istilah	xi
Daftar Singkatan	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Metode Penelitian	14
 BAB II POSISI ISLAM DI MASSA ORDE BARU	
A. Kemelut Gerakan Islam Bentuk Perlawanan Terhadap Azaz Tunggal	17
B. Menjamurnya Pers Islam Di Indonesia.....	32
C. Peta Pers Islam.....	46
 BAB III RENTANG PANJANG LAHIRNYA SABILI	
A. Sabili Fase Pembentukan di Orde Baru 1985.....	51

B. Sabili Fase Perdana tahap Awal wujud 1998-1991.....	56
C. Sabili Modernisasi format 1991-1993	61
D. Sabili 1998-2000 Wujud Baru Di Era Reformasi.....	68
E. Sabili Dalam Dua Zaman Sebuah Perbandingan.....	70

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	80
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR INFORMAN

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Majalah Islam yang memegang SIUPP dan STT	38
Tabel 2. Sabili Sebuah Perbandingan Orde Baru dan Reformasi.....	75
Tabel 3. Perubahan Redaksi Sabili dari 1985-2000.....	76
Tabel 4. Majalah Sabili Orde Baru dan Pasca Reformasi.....	

DAFTAR ISTILAH

Ad'u	: Mengajak/Berdakwah
Almiyat	: Dunia Islam
Akomodatif	: Menyesuaikan diri
Akidah	: Kepercayaan dasar / keyakinan pokok
Antagonistik	: Bersifat selalu menentang, melawan
Buhust	: Telaah Utama
Caos	: Bentrok, Benturan fisik
Counter Idea	: Balasan Ide
Daulah Al-Islamiyah	: Negara Islam
Deadline	: Jadwal Terbit
Defenitiv	: Devenisi
Dekrit	: Keputusan (ketetapan)/perintah yang dikeluarkan kepala negara
Door To Door	: Dari Pintu ke pintu, bergiliran dari rumah kerumah
Dziroyat	: Kenangan
Ektrem Kanan	: Kelompok radikal Islam
Filter	: Saringan
Fraksi	: Bagian kecil, kelompok dibadan legislatif
Fundamental	: Kental, mendalam
Grasroot Mass	: Masyarakat Luas
Hegemonic Party Sistem	: Sistem Hegemoni partai

Hiwar	: Wawancara
Ijtimaiyah A-Islamiyah	: Masyarakat Islam
Inikasad	: Responsi
Islam Phobi	: Kebencian terhadap Islam
Islamic Revivalis	: Pembaharuan Islam
Istifta	: Tanya Jawab
Jalasad	: Berbagi
Jaulat	: Perjalanan
Kamar Prodeo	: Penjara
Khidmah	: Pelayanan
Khilafah Al-Islamiyah	: Persatuan Umat Islam seluruh Dunia
Konfrontasi	: Permusuhan, Pertentangan
Kredibilitas	: Sesuatu yang terhormat, dapat dipuji
Layaliyat	: Semalam
Lambung Suara	: Pemilih suara terbanyak
Mabit	: Melakukan kegiatan sehari-hari secara bersama pada suatu tempat
Nadzrot	: Pandangan
Naqib	: Pimpinan Usroh
Negara Pancasila	: Orde baru menerapkan azaz tunggal/Negara berazazkan Pancasila
Onderbow	: Kaki tangan, perpanjangan tangan
Political Test	: Tes Politik

Reformasi	: Perubahan secara drastis untuk perubahan di suatu negara
Represif	: Menekan, mengekang, menahan, Menindas
Resiprokal Kritis	: Kondisional
Ru'yat	: Perspektif
Ruhaniyat	: Nasehat Rohani
Sayap Islam	: Kelompok Islam
Siyasah	: Politik
Status Quo	: Mempertahankan Kekuasaan
Syaksiyah Al-Islamiyah	: Pribadi Islam
Ta'aruf	: Saling Mengenal
Tadrib	: Pelatihan
Tafahum	: Saling Memahami
Tafakul	: Saling Membantu
Tarbiyah	: Pembinaan
Taujih	: Pengarahan
Thulabiyah	: Pelajar
Usroh	: Kelompok-kelompok kecil, lingkaran, keluarga
Usroh Al-Islamiyah	: Keluarga Islam
Wahat	: Oase
Walk Out	: Aksi keluar dari persidangan
Waqofat	: Peristiwa

DAFTAR SINGKATAN

ABIM	: Angkatan Belia Islam Malaysia
ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
Deppen	: Departemen Penerangan
GOLKAR	: Golongan Karya
ICMI	: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
IKIP Jakarta	: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta
IM	: Ikhwanul Muslimin
ISA	: Internal Security Act
ITB	: Institut Teknologi Bandung
KAMI	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
KAPPI	: Kesatuan Pemuda Pelajar Indonesia
MASYUMI	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia
KTAI	: Kelompok Telaah Amaliah Islam
Menpen	: Menteri Penerangan
Menkopolkam	: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NII	: Negara Islam Indonesia
NU	: Nahlatul Ulama
Orba	: Orde Baru

Parpol	: Partai Politik
Pangkopkamtib	: Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
Pangab	: Panglima ABRI
PB PII	: Pengurus Besar Persatuan Pelajar Indonesia
PERSIS	: Persatuan Islam
PII	: Persatuan Pelajar Indonesia
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PK	: Partai Keadilan
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PT	: Perseroan Terbatas
PW NU	: Pengurus Wilayah Nahlatul Ulama
P4	: Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pacasila
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SARA	: Suku Agama Ras
SIUPP	: Surat Izin Usha Penerbitan Perusahaan Pers
SKB	: Surat Keputusan Bersama
STT	: Surat Tanda Terbit
SU MPR	: Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat
Supersemar	: Surat Perintah Sebelas Maret
TII	: Tentara Islam Indonesia
TNI	: Tentara Nasional Indonesia

TV : Televisi
UU : Undang-Undang
UUD : Undang-Undang Dasar
UI : Universitas Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan gerakan mahasiswa pada tahun 1966 dalam menjatuhkan rezim orde lama dibawah kepemimpinan Soekarno merupakan sesuatu yang dilematis sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Kejatuhan Soekarno diawali oleh percobaan kudeta oleh PKI tahun 1965 dikenal dengan gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI. Gerakan tersebut mempengaruhi kepemimpinan Soekarno sebagai Presiden pada masa itu. Orde lama berhasil dijatuhkan oleh mahasiswa dengan melakukan aksi demonstrasi dan menuntut pemerintah untuk membubarkan PKI dan membersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI. Tuntutan tersebut menjadi bukti bahwa kepemimpinan Soekarno tidak lagi menjadi sebuah harga tawar dalam masyarakat.

Kepemimpinan Soekarno dipertanyakan oleh masyarakat termasuk kalangan mahasiswa. Mahasiswa yang tergabung dalam KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) KAPPI (Kesatuan Pemuda Pelajar Indonesia) mendesak Soekarno membubarkan PKI. Melalui dukungan rakyat, organisasi kepemudaan bergerak melakukan aksi demo. Dukungan yang kuat dari TNI Angkatan Darat telah membantu kesuksesan tumbanganya rezim yang lebih condong ke PKI. Dengan demikian berakhirnya rezim orde lama membuat harapan-harapan akan kebebasan, penerapan demokrasi amat didambakan melalui naiknya Mayor Jendral Soeharto sebagai pemimpin orde baru.

Dinamika politik yang terjadi terhadap pemerintahan Soekarno membuahkan hasil dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Melalui Supersemar ini akhirnya pemerintahan Soekarno jatuh dan digantikan oleh Mayor Jendral Soeharto tahun 1967 yang dipercaya oleh MPRS sebagai Pejabat Presiden. Soeharto selaku pimpinan Orde baru dibawah dukungan Mahasiswa, Rakyat, dan TNI Angkatan Darat.

Harapan untuk terciptanya tatanan demokrasi yang baik dan kebebasan perspun diambang pintu terhadap rezim baru. Ternyata harapan tersebut menjadi tidak terealisasi dengan baik, buktinya pada awal-awal kekuasaan orde baru kebebasan pers diperketat, dengan dibreidelnya surat kabar Sinar Harapan tahun 1986 nyaris ditutup oleh pemerintah.

Format politik Orde baru menciptakan keseimbangan antara konflik dan konsesus. Seperti yang diungkapkan oleh Alfian yaitu adanya "kebutuhan". Sisi lain mungkin saja konflik yang ditekankan, sedangkan pada saat yang lain adalah konsesus. Pemikiran Alfian ini sering disebut "demokrasi gelang karet". Seperti layaknya karet, demokrasi pun demikian. Kebebasan dan keterbukaan suatu saat dikedepankan, sedangkan pada saat sebaliknya¹.

Praktek demokrasi gelang karet menurut Alfian ini terbukti ketika diberlakukan azaz tunggal pancasila pada tahun 1985, ini sebuah pembuktian dari penekanan pemerintah orde baru terhadap keseimbangan dan konsensus yang sesuai dengan karakteristik politik orde baru. Prof. Dr. Deliar Noer

¹Drs. Abdul Azis Thaba, M.A, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press 1996) hal 188

salah satu tokoh Islam yang paling aktif menolak azas tunggal Pancasila pada saat RUU-nya di bahas di DPR. Deliar Noer mengemukakan alasan bahwa pancasila sebagai asas tunggal menafikan perbedaan, padahal “perbedaan dalam persamaan” adalah hak yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²

Segala kekurangan dan kelebihan dari orde baru telah mencapai pertumbuhan yang tinggi selama 30 tahun, swasembada beras, penurunan angka kemiskinan yang tajam, peningkatan kesejahteraan rakyat. Bahwa akhirnya harus di akhiri, tidak seluruh kebijakan Orde Baru yang tidak layak untuk di teruskan. Seandainya kita bisa melakukan proses demokratisasi secara wajar, melepaskan hak Golkar sebagai mayoritas tunggal, melepaskan PNS/ABRI sebagai pendukung Golkar permanen, membangun perekonomian sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, membangun Sistem Jaminan Sosial secara berkelanjutan, cita-cita buat apa Negara didirikan mungkin akan semakin dekat.³

Sebelumnya gerakan koreksi terhadap rencana pembangunan mirip apa yang dilakukan oleh Soekarno terhadap gerakan-gerakan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintahan orde baru dikritik oleh mahasiswa lewat gerakan 1977/1978. Namun, kekecewaan terhadap kepemimpinan orde baru kembali di ungkapkan oleh kelompok Islam terutama terhadap tanggapan pidato presiden Soeharto di Pekanbaru dalam apel Kostrad yang kemudian memunculkan Petisi 50.

² Ibid Drs. Abdul Azis Thaba, M.A, hal 273

³ Sulastomo, *Hari-Hari Yang Panjang Transisi Orde lama ke Orde Baru*(Jakarta; Kompas Media Nusantara, hal 200-201

Kekuatan orde baru yang represif dan sikap pemerintah kembali yang dapat menggoyang dan mengkritik kepemimpinannya. Pengawasan yang ketat terhadap media pers maupun gerakan-gerakan rakyat terutama gerakan mahasiswa mendapat pengawasan yang ketat.

Beberapa tulisan Abdul Syukur dalam buku gerakan Usroh di Lampung 1989 bahwasannya orde baru sengaja mempolarisasi kekuatan yang ada setelah tumbangnya kaum kiri (haluan marxis) terutama bekas anggota PKI, adanya kekuatan Islam dikelola ada Islam garis keras disebut bekas NII dan yang moderat⁴. Lewat Jendral Ali Meortopo desain politik orde baru di arsitekinya. Sementara itu tahun 1980-an ditengah gencarnya pembredelan terhadap pers seperti jurnal, Ekuin (1983) Sinar Harapan (1986) dan Prioritas (1987) ditahun itu juga bermunculan gerakan Islam tipe usroh, gerakan Islam ini berbasis ideologi. Kemunculan gerakan itu tak terlepas oleh pengaruh Islam Timur Tengah yang dibawa oleh pelajar Islam dari Mesir.⁵ Maraknya gerakan Islam tentunya berbanding lurus dengan berkembangnya pers islam di Indonesia.

Dalam rangka mensolidkan kekuatan, orde baru menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara maka dirancanglah P4 sebagai doktrin orde baru terhadap pelaksanaan demokrasi. Pada tahun 1985 dikeluarkanlah UU No 8 1985 tentang asas tunggal pancasila. Dalam hal doktrin Orde baru menimbulkan respon balik diantara kelompok-kelompok Islam yang

⁴ Abdul Syukur, *Gerakan usroh Peristiwa Lampung Berdarah 1989* (Jakarta:Ombak, 2003) hal 20-24

⁵ Agung Pardini, *Makalah Majalah Islam Sabili (Media Revivalis Gerakan Tarbyiah 1988-1993)* hal,I <http://www.indopub.com>

menerima dan tidak menerima, ada yang menerima seperti NU dan Muhammadiyah namun kelompok-kelompok menolak seperti dipimpin Abdullah Sungkar kemudian dihancurkan Orde baru.⁶

Tidak hanya kelompok separatis yang berpotensi merusak stabilitas yang dihancurkan, tapi juga kelompok kemasyarakatan yang memiliki indikasi penolakan ideologi pancasila. Bahkan pers dimonitor dan dikontrol agar menciptakan suasana stabil.

Istilah pers dimaksudkan adalah secara harfiah pers berarti cetak dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak (*printed publication*). Pers mempunyai dua sisi kedudukan, yaitu: pertama ia merupakan medium komunikasi yang tertua di dunia, dan kedua, pers sebagai lembaga masyarakat atau institusi sosial merupakan bagian integral dari masyarakat, dan bukan merupakan unsur yang asing dan terpisah dari padanya. Sebagai lembaga masyarakat ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga-lembaga masyarakat lainnya.

Pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), yang berkali-kali dilakukan rezim Orde Baru, hakekatnya adalah sama dengan pembreidelan, karena itu dilakukan atas alasan isi pemberitaan. Padahal UU Pokok Pers tegas mengatakan tidak ada pembreidelan. SIUPP seharusnya hanya berkaitan dengan faktor ekonomis/usaha, bukan isi berita. Di Indonesia, kalau kita bicara tentang "kebebasan pers," maka kita kenal sebutan "Pers Pancasila." Di sini akan terlihat, bagaimana Pancasila "diobral" dan dijadikan

⁶ *Ibid*, Abdul Syukur, hal 54

dalih untuk melegitimasi berbagai tindakan dan praktek pembatasan kebebasan pers. Sidang Pleno XXV Dewan Pers (Desember 1984) merumuskan Pers Pancasila sebagai berikut: "Pers Indonesia adalah Pers Pancasila dalam arti pers yang orientasi, sikap dan tingkah lakunya berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945." Hakekat Pers Pancasila adalah pers yang sehat, yakni pers yang bebas dan bertanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif. Kalau mengacu buku Sistem Pers Indonesia (Atmadi:1985), disebutkan, akar dari sistem kebebasan pers Indonesia adalah landasan idiil, ialah Pancasila, dengan landasan konstitusional, UUD 1945.

Kemudian disebutkan, pers adalah salah satu media pendukung keberhasilan pembangunan. Bentuk dan isi pers Indonesia perlu mencerminkan bentuk dan isi pembangunan. Kepentingan pers nasional perlu mencerminkan kepentingan pembangunan nasional. Inilah yang disebut "pers pembangunan," model yang juga banyak diterapkan di negara sedang berkembang lainnya. Meski sepintas kedengarannya juga masih bagus, namun implikasinya adalah: pembangunan dianggap sudah merupakan program rezim Orde Baru, maka pers harus mendukung pemerintah Orde Baru.

Seiring dengan tindakan keras yang dilakukan oleh pemerintah orde baru terhadap gerakan-gerakan yang tidak menerima pancasila sebagai asas tunggal maka gerakan itu dituduh orde baru sebagai gerakan melawan negara dan adanya indikasi pemberontakan. Kebijakan pemerintah terhadap umat

Islam memunculkan peristiwa "Tanjung Priok" yang ternyata telah membuat aktivis gerakan Islam kecewa terhadap orde baru. Munculnya kelompok pengajian (usroh) yang menjadikan Islam sebagai pedoman seperti apa yang dilakukan oleh kelompok Usroh Abdullah Sungkar 1985-1986 dan peristiwa Lampung (Talang Sari) 1989.

Ditahun yang sama muncul gerakan Islam yang mencoba mendistribusikan informasi dan dakwah Islam melalui media cetak yang diparkarsai oleh Zainal Muttaqin yang bernama Sabili yang berarti "Jalanku". Perjalanan majalah Sabili juga tak terlepas dari latar belakang peristiwa sosial politik yang tengah terjadi ditahun itu adanya peristiwa Tanjung Priok merupakan salah satu akar dari majalah sabili. Majalah Sabili terbit pertama kali tahun 1985 dan pada tahun 1993 majalah Sabili di breidel oleh pemerintah karena dianggap sebagai majalah yang memancing SARA dan ditahun itu Sabili berhenti untuk terbit hingga tahun 1998.

Pertumbuhan gerakan Islam tersebut telah memunculkan tekanan politik baru ketika kelas menengah muslim mendesakkan representasi yang lebih besar bagi umat Islam dalam pemerintahan dan masyarakat. Perkembangan ini di mulai dari di syahkannya RUU Pendidikan Nasional dan RUU Peradilan Agama menjadi undang-undang pada tahun 1989. Namun upaya dari pemerintah ini sesungguhnya merupakan strategi untuk mendiamkan seruan demokrasi dan liberalisasi politik yang sedang tumbuh

pada saat itu dengan memecah gerakan prodemokrasi di sepanjang garis keagamaan.⁷

Presiden Soeharto sedang berusaha mencari simpati dari kelompok Islam dengan cara meminimalisir tekanan terhadap umat Islam seperti yang pernah dilakukan pada masa sebelumnya. Kebijakan Presiden Soeharto ini di sinyalir ada kaitannya dengan keretakan hubungan antara dirinya dengan beberapa petinggi militer yang sebelumnya menjadi tangan kanan presiden. Keretakan Presiden-Militer ini puncaknya pada pengantian secara mendadak jabatan Panglima ABRI dari komando Jendral Beny Moerdani, yang selama ini menguasai sistem intelijen negara, kepada Jendral Try Soetrisno, yang berlatar belakang santri.

Kesan keengganan pihak Orde Baru tidak segera menutup Sabili setidaknya dapat didasari dari tiga pendapat. Pendapat pertama, Sabili lahir bertepatan waktunya dengan dimulainya fase akomodatif oleh negara kepada umat Islam. Masa pemberian akomodasi ini ditandai dengan adanya pertumbuhan Islam yang luar biasa di Indonesia⁸

Salah satu bentuk strategi dakwah yang coba dikerjakan oleh para aktivis gerakan Tarbiyah dalam menyebarkan ide-ide *revivalisme* adalah dengan membangun sebuah media masa Islam. Maka pada pertengahan tahun

⁷ Khamami Zad, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia* Jakarta:Teraju,2002).hal 44-54

⁸ M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana,1999). Hal.227-228. Fase akomodasi ini diawali dengan sejumlah kebijakan Presiden Soeharto pada tahun 1998 dianggap menguntungkan umat Islam. Kebijakan itu diantaranya adalah : pemberhentian Jenderal L.B. Moerdani dari jabatannya sebagai Panglima ABRI, serta mulai berkurangnya jumlah kelompok “islam phobi” baik di dalam jajaran kementerian Kabinet Pembangunan V, maupun didalam struktur kepengurusan GOLKAR.

1980-an, lahir majalah baru berukuran setengah folio yang bernama SABILI, yang dalam bahasa Arab berarti 'jalanku'. Majalah ini secara gotong royong di bangun oleh para aktivis muslim yang tergolong dalam Kelompok Telaah dan Amaliah Islam (KTAI). Edisi pertama Sabili antara lain dikerjakan oleh lima orang, yaitu KH. Rahmat Abdullah (dengan nama Abu Fida) selaku pemimpin redaksi merangkap pemimpin umum dan penanggung jawab, Muhamad Zainal Muttaqin nama samarannya (Muhamad Ishaq atau Abu Rodli) dan Ade Erlangga Masdiana sebagai dewan redaksi. Afrianto (Arifin Toat) sebagai penanggung jawab distributor, serta Ahmad Fery Firman (Atwal Arifin) yang mengerjakan proses setting dan lay out.⁹

Bertahannya majalah Sabili selama kurang lebih lima tahun, antara 1988 sampai 1993, bahkan dapat terus meningkatkan angkasa tirasnya sehingga mencapai 60.000 di awal tahun 1993, dapat dianalisis kedalam beberapa faktor yang mendukung. Faktornya adalah: kondisi sosial-politik nasional. Kebijakan pemerintah orde baru pada saat itu yang tidak mau segera menutup atau membredel penerbitan majalah Sabili serta tidak pula menangkapi para pengelolanya. Padahal pada saat itu, tidaklah bagi penguasa Orde Baru untuk membredel suatu media masa, baik melalui pendekatan hukum (melalui jeratan peraturan perundang-undangan yang berlaku) maupun dengan pendekatan keamanan dan intelijen.

Adanya media pers dikalangan aktivis Islam untuk memperkuat bentuk gerakan. Media Islam yang marak tumbuh dan berkembang menjadi tumpuan

⁹ *Ibid*, Agung Pardini. Hal 3

gerakan itu salah satunya adalah majalah sabili. Majalah sabili pada awalnya adalah sebuah majalah ilegal yang terbit 1985, namun ditahun 1988 sampai 1993 majalah ini dapat terbit dan berkembang dengan pesatnya. Menariknya penelitian majalah sabili, jika dilihat perkembangan majalah Sabili yang lahir dari tekanan terhadap Islam. Kemudian menjadi alat pergerakan Islam dalam menolak demokrasi pancasila di zaman rezim orde baru, namun setelah reformasi majalah Sabili menjadi dianggap media perpanjangan tangan salah satu partai Islam, yaitu Partai Keadilan (PK).

Ada kesamaan tokoh dan orang yang mendirikan Sabili dengan yang melahirkan Partai Keadilan menjadi salah satu alasan anggapan tersebut.. Dengan demikian maka, penelitian ini memfokuskan kepada perkembangan majalah Sabili diawal kelahiran dilihat dari flatform gerakannya terutama sekali dari segi ideologi Islam. Media masa kental memperlihatkan ideologi pemilik atau pun pendiri dalam kontruksi teks. Sabili mempunyai pengaruh terhadap Islam di Indonesia bagi pembaca media masa Islam bahkan menjadi identitas bagi para aktivis muda Islam. Maka dalam hal ini untuk menjelaskan hal itu penting dilakukan penelitian tentang majalah Sabili karena pada era reformasi majalah sabili condong lebih menyuarakan kepentingan partai Islam yang lebih dominannya Partai Keadilan.

B. Perumusan dan Batasan Masalah

Agar penulisan ini mengarah pada inti yang diteliti, maka perlu kiranya ditetapkan batasan-batasan penulisan, adapun batasan spasialnya (batasan wilayah) dan batasan temporalnya (batasan waktunya). Untuk batasan spasial

adalah di tempat akar dari lahirnya majalah Sabili yaitu Jakarta sedangkan untuk batasan spasialnya adalah antara tahun 1985 sampai tahun 2000 karena mewakili dua zaman yang berbeda orde baru dan reformasi. Penelitian ini merupakan studi sejarah yang akan melihat perkembangan majalah Sabili sebagai kajian pers namun tidak hanya itu keterkaitan lahirnya majalah Sabili tidak jauh dari rangkaian peristiwa sosial politik yang berkembang pada masa itu

Untuk memperjelas pokok permasalahan yang akan dibahas maka pembahasan akan memberikan ruang lingkup dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan Sabili, sumber dana, konten isi dan Ideologi diawal kelahirannya?
2. Bagaimanakah perkembangan Sabili sebagai majalah yang tidak mempunyai SIUPP pada masa orde baru ke majalah yang sudah mempunyai SIUPP di masa reformasi?
3. Bagaimana perubahan format majalah Sabili dari majalah yang Independen (media dakwah Islam) masa orde baru ke zaman reformasi?

C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian penelitian adalah:

1. Menjelaskan kondisi Sabili di masa orde baru
2. Memperoleh informasi mengenai perkembangan pers di masa orde baru

3. Memperoleh informasi mengenai perubahan-perubahan majalah Sabili masa orde baru sampai reformasi

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini dimaksudkan adalah:

1. Memberikan informasi yang jelas mengenai gambaran kondisi sosial politik yang berkembang pada awal kemunculan majalah Sabili.
2. Memberikan sebuah gambaran perkembangan pers Islam khususnya Sabili di Indonesia pada masa Orde Baru dan masa Reformasi

E. Tinjauan Pustaka

Tulisan mengenai sejarah pers sudah mulai menarik untuk dikembangkan terutama adanya momentum penting dalam rangkaian peristiwa sejarah di Indonesia. Perjalanan sejarah bangsa telah menunjukkan peranan penting media dalam membantu menyampaikan pesan pada khalayak berupa berita, hiburan dan bahkan iklan, dengan adanya media cetak berupa koran, majalah, jurnal dan buletin merupakan alat yang telah memberikan fungsi yang jelas dalam memberikan informasi. Edward C.Smit menulis perjalanan pers di Indonesia sebelum kemerdekaan hingga kemerdekaan menggambarkan pers sering dikebiri sesuai kepentingan penguasa, dan dalam harian Tempo Edisi Khusus tahun 2000 menjelaskan dari orde lama hingga berakhirnya orde baru Pers selalu ditekan dan dibugkam padahal pers merupakan ujung tombak

perubahan sosial dan pers juga membantu dalam hal pencerdasan menuju masyarakat modern.

Sejauh ini tulisan yang membahas secara khusus mengenai perkembangan majalah Sabili masih belum secara mendalam menjelaskan mengenai perkembangan majalah Sabili, adapun tulisan yang tentang Sabili baru berupa makalah, seperti tulisannya Agung Pardini, *Majalah Islam Sabili (Media Revivalis Gerakan Tarbiyah 1988-1993)* dan tulisan Ema khotimah mengenai Analisis wacana tentang pemberitaan majalah Sabili khusus melihat mengenai pemberitaan satu tema majalah Sabili analisis wacana tandingan.

Selain itu buku yang membahas mengenai sejarah pers seperti yang ditulis oleh Abdul Syukur peristiwa Lampung berdarah 1989. Abdul Syukur membahas pemberitaan sekitar peristiwa Lampung berdarah namun dalam buku bukanlah membahas perkembangan pers.

Perkembangan kehidupan sosial politik dan perubahan-perubahan yang terjadi pada tahun 1974-1985 menjadikan situasi pemerintahan Orde Baru semakin panas. Terutama setelah terjadi peristiwa Malari adanya tuntutan dan kritikan terhadap pemerintah berlanjut tahun 1977/1978 situasi politik yang makin memanas akhirnya dapat dikendalikan oleh orde baru. Pemerintahan orde baru sukses menyatukan kekuatan dan stabilitas nasional pembangunan ekonomi dirancang dengan model Rostow dengan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi Indonesia, lebih jelas kondisi sosial politik Indonesia orde baru dalam tulisannya Arief Budiman & Olle Ternquist dalam *Aktor Demokrasi, Catatan tentang gerakan perlawanan di Indonesia*. Beberapa

Buku yang berhubungan dengan Islam dan Negara dan Politik Orde Baru seperti karangan Drs. Abdul Thaba M.A *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Buku Drs. Ridwan Saidi *Islam Politik dan Pembangunan*. B. J Boland *Pergumulan Islam dan Indonesia*. Fachri Ali dan Bahctiar Efendi *Merambah jalan Baru Islam*. Buku yang berhubungan yang berhubungan dengan Pers karangan Hendranaldi Booming Surat Kabar di Sumatera S Westkust dan buku yang diterbitkan Asosiasi Wartawan Mislim Indonesia (AWAM) Indonesia *Malpraktek Pers Indoensia Dari Somasi BJ Habibi ke tuntutan Tomy Winata*.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini digunakan metode sejarah (historical method) adapun dalam metode sejarah memiliki langkah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. adapun langkah metodenya adalah pertama Heuristik mengumpulkan data / fakta yang diperlukan adapun sumber yang digunakan adalah sumber primer dan sumber skunder

Penulisan sejarah yang terbagi atas empat tahapan. Pertama, heuristik yaitu teknik pegumpulan sumber data sejarah mengenai kajian ini, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Kedua kritik sumber, yaitu tahap pengolahan data atau menganalisis sumber informasi dan kevalidan data. Ketiga, analisis, sintesis dan menginterpretasikan informasi yang telah diseleksi. Empat, historiografi, penyajian dalam bentuk penulisan ilmiah.

Pada tahapan Heuristik dikumpulkan baik sumber primer, maupun sumber sekunder, dalam bentuk dokumen, buku maupun dalam bentuk lisan, yang didapat dari Koran-koran, majalah, arsip-arsip maupun jurnal-jurnal yang berhubungan dengan perkembangan majalah Sabili. Untuk melengkapi sumber primer perlu dilakukan wawancara tak terstruktur, dengan tokoh-tokoh yang menjadi pelaku sejarah yang berhubungan dengan penulisan ini dan dokumen mengenai majalah sabili serta majalah sabili itu sendiri.

Dalam melengkapi sumber sekunder yang berguna untuk melengkapi data-data penulisan didapat melalui studi kepustakaan. Data tersebut berupa buku-buku, artikel, jurnal, majalah dan bahan-bahan lain yang relevan. Studi kepustakaan ini dilakukan pada beberapa perpustakaan, yaitu perpustakaan Jurusan Sejarah UNP, FIS-UNP, Perpustakaan Pusat UNP, Perpustakaan FISIP-UNAND, perpustakaan Sastra-UNAND, perpustakaan IAIN Imam Bonjol, Perpustakaan Pasca sarjana IAIN Imam Bonjol, Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat.

Pada tahap selanjutnya dilakukan Kritik Sumber, yaitu dengan melakukan kritik Ekstern dan kritik Intern. Kritik ekstern dilakukan dengan pengujian terhadap keabsahan atau keaslian dokumen, arsip dan sebagainya. Kritik intern dilakukan dengan membandingkan data-data atau menguji secara silang data-data dokumen atau arsip. Tahapan *ketiga* adalah interpretasi data. Data-data dari dokumen, arsip, koran dan lain-lain dikelompokkan atau diklasifikasikan serta dihubungkan satu sama lain. Data Dokumen di dapatkan dengan cara langsung ke penerbit Sabili di Jakarta, baik data yang berupa

dokumen asli ataupun berupa tambahan dari koleksi majalah Sabili. Melakukan wawancara terstruktur langsung dengan tokoh-tokoh pendiri dan yang telah membesarkan majalah Sabili.

BAB II

POSISI ISLAM DI MASSA ORDE BARU

A. Kemelut Gerakan Islam Bentuk Perlawanan Terhadap Azaz Tunggal

Pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan represif "untuk mencegah naiknya sayap Islam" tersebut. Tuduhan yang sering ditimpakan kepada (sayap Islam) adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan Islam. Pancasila terdiri dari lima sila, yaitu: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Penetapan ini bersifat sementara, karena Sidang Kontituante tahun 1957 memperdebatkan tiga usulan dasar negara, yaitu Pancasila Islam, dan Sosial Ekonomi. Perdebatan dasar negara dalam Sidang Kontituante dihentikan oleh presiden.

Soekarno melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan Sidang Konstituante hasil Pemilu 1955 dan menegaskan kembali pada UUD 1945 dan Pancasila. Jenderal Soeharto yang menggantikan Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1968 menjadikan UUD 1945 dan Pancasila menjadi harta warisan yang tidak boleh diubah, dikurangi maupun ditambah. Bahkan sejak 1976 ia mengemukakan gagasan untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang

disampaikannya secara berturut-turut pada acara Kongres Nasional Pramuka 12 April 1976, Peringatan Hari Pramuka ke –XV 14 Agustus 1976.

Kalangan Islam baik yang berada di luar parlemen maupun didalam parlemen menjadi penentang utama terhadap gagasan Presiden Soeharto untuk ”meresapi, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat”. Fraksi Persatuan Pembangunan merupakan wakil kalangan Islam di parlemen. Mereka melakukan aksi *walk out* dari ruangan sidang Komisi B dalam Sidang Umum MPR pada tanggal 18 Maret 1978 yang megesahkan rumusan P4 menjadi Tap No. II MPR/1978. Presiden Soeharto sangat marah dengan aksi *walk out* anggota Fraksi PPP dan menuduh kalangan Islam tidak setia terhadap ideologi Pancasila sebagaimana dikemukakannya dalam pidato tanpa teks pada acara Rapim ABRI di Pekan Baru, Riau, 27 Maret 1980.¹⁰

Pada awal dekade 1980-an, perkembangan Islam di Indonesia oleh munculnya fenomena meningkatnya semangat religiusitas umat yang sering dikenal sebagai lahirnya kebangkitan Islam (*Islamic Revitavalissm*). Kebangkitan Islam ini ditandai oleh munculnya gerakan Islam baru yang memiliki basis idiologi, pemikiran, dan strategi gerakan yang berbeda dengan gerakan atau ormas-ormas Islam yang telah ada sebelumnya, seperti NU, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Irsyad, Jamaat Khair dan sebagainya. Ketegangan politik antara Negara dengan umat Islam yang merasa khawatir dengan

¹⁰ Abdul Syukur. “*Gerakan Usroh Di Indonesia , Peristiwa Lampung 1989*.(Yogyakarta: Penerbit, Ombak, 2003) hal 27-29

kebijakan-kebijakan pemerintah ternyata telah mendorong rasa identitas rasa identitas keagamaan di sebagian kalangan umat Islam ¹¹.

Pada awal pemerintahan Orde Baru, dikalangan aktivis Islam timbul optimisme untuk kembali memainkan peranan dominan dalam politik nasional, mengingat sumbangan mereka dalam meruntuhkan rezim Orde Lama. Kerja sama ABRI, organisasi mahasiswa, dan kelompok Islam dalam menjatuhkan PKI dan Bung Karno setelah terjadinya G30-S/PKI memberikan indikasi bahwa Islam mendapatkan legitimasi dalam peran politiknya. Tetapi optimisme itu buyar ketika ABRI menyatakan PKI dan MASYUMI sebagai partai terlarang karena dianggap pernah menyeleweng dari Pancasila dan UUD 1945. Setelah Masyumi dinyatakan sebagai partai terlarang, kedudukan dan peranan politik Islam berada di posisi pinggiran. Walaupun secara politis peranan umat Islam bersifat marginal, sampai saat ini mereka adalah kelompok strategis yang banyak dipertimbangkan, seperti pada setiap pemilu; isu-isu yang menonjol yang menjadi tema kampanye selalu berkisar tentang Islam. ¹²

Hubungan antara Islam dan negara era Orde Baru dapat di bagi dalam tiga periode, *Periode Pertama*; 1967-1982. Hubungan antara Islam dan negara pada awal Orde Baru ditandai oleh pola yang bersifat antagonistik dengan dimilikinya posisi hegemonik oleh negara, sedangkan Islam berada di

¹¹ Fred R. Von der Mehden, “ *Malaysia dan Indonesia* “, Shiren T. Hunter (ed) *Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan* (yogya: Tiara Wacana, 2001), hal.272.

¹² Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press 1996) hal 25-26

pinggiran. Dalam pola hubungan ini, Islam dan negara saling berlawanan, bahkan cenderung terlihat dalam konflik.

Pola demikian ini mulai terbentuk dengan mantap sejak pemilu tahun 1971 yang menghasilkan kemenangan mayoritas bagi Golkar. Sejak itu, sistem kepartaian berbentuk *hegemonic party system* dan terus berlangsung pada pemilu-pemilu berikutnya. Kemenangan mutlak Golkar ini memberikan legitimasi pemerintah untuk meneruskan kebijakannya. Penataan kelembagaan politik yang penting pada periode ini adalah fusi partai pada tahun 1973. Fusi partai ini telah memotong basis massa parpol, terutama parpol yang bergabung dalam PPP. Hal ini menimbulkan krisis identitas karena fusi itu berarti pula sekularisasi politik secara formal dan simbolik.¹³

Persepsi pemerintah yang menganggap kekuatan politik Islam sebagai ancaman membuat banyak kebijakan pemerintah merugikan kepentingan Islam. Dikenalkan istilah *Islam Phobi* (orang Islam yang takut kepada Islam). Misalnya dalam RUU perkawinan, masalah perjudian, larangan pemakaian jilbab di sekolah-sekolah, penghapusan libur pada bulan Ramadhan, sensor terhadap naskah khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, aliran kepercayaan, gagasan P-4 pada 1977, SU MPR 1978 (kemudian menjadi Tap No. II/MPR/1978), dan lain sebagainya. Dalam periode ini pemerintah melakukan birokrasi politik untuk "menjinakkan" Islam. Di pihak lain, oleh sebagian kalangan Islam, ketidakpuasan pemerintah di lampiaskan dalam bentuk konfrontasi, seperti

¹³ *Ibid hal 25*

gerakan Komando Jihad, pembajakan pesawat Garuda Woyla, Kasus Lampung, dan Gerakan Teror Warman.¹⁴

Periode kedua, 1982-1985 Dalam periode ini sifat antagonistik masih tetap, akan tetapi kedua pihak berupaya untuk perlahan-lahan mengurangi kecurigaan dengan saling memahami posisi masing-masing. Negara mulai memandang penduduk Islam yang merupakan mayoritas bangsa sebagai faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Sebaliknya, Islam mulai menempatkan negara dalam posisi yang tidak konfrontatif. Periode ini dapat disebut dengan *resiprokal-kritis*.

Tahun 1982-1985 terjadi "ketegangan konseptual" yang dapat mengganggu upaya pendekatan kedua belah pihak, yaitu kebijaksanaan pemerintah untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi *political test* umat Islam. Berbagai reaksi muncul, baik yang mendukung maupun yang menolak. Sikap yang terakhir ini terbagi, ada yang menolak secara berhati-hati dan ada pula yang menolak tanpa konpromi. Ormas yang mengambil sikap tanpa kompromi akhirnya menerima resiko tidak mendaftarkan organisasinya sebagai ormas yang secara formal diakui oleh pemerintah, seperti yang dilakukan oleh PII.

Hal ini dapat diatasi dengan ditetapkannya UU No. 3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya dan UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah menegaskan bahwa Pancasila bukanlah agama dan tidak akan dijadikan agama. Sedangkan pihak Islam

¹⁴ *Ibid hal 26-27*

memandang bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pengakuan atas asas tunggal Pancasila tidak mengganggu akidah dan orientasi sebab terlebih dahulu “disiati” dengan “mengislamkan” Pancasila.¹⁵

Dengan diterimanya Pancasila sebagai asas, secara institusional tidak ada lagi partai politik Islam. PPP tidak lagi dapat mengklaim dirinya sebagai partai politik Islam, paling tidak secara formal. Implikasinya, pada setiap kali pemilu, soal-soal keislaman dijadikan isu utama oleh ketiga partai OPP untuk menarik masa Islam. Mereka berlomba-lomba meneguhkan kesan keislaman dalam setiap kampanyenya “Berkah” lainnya adalah, trauma sejarah Orde Baru terhadap mitos pembangkangan Islam mulai memudar. Kesiapan seluruh orsospol dan ormas menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas memberikan legitimasi politik bagi negara untuk meneruskan pembangunan. Kekhawatiran akan munculnya “Negara Islam Indonesia” mulai mencair. Ahmad Syafi’i Ma’arif mengatakan:

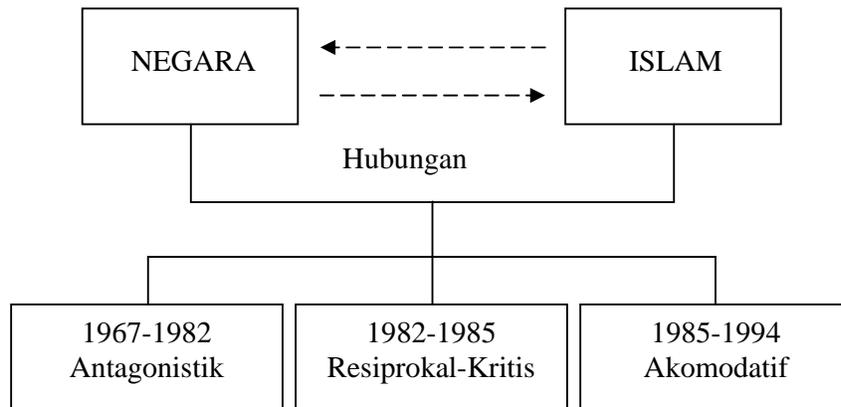
“Kelumpuhan umat Islam dalam politik tidak berarti kelumpuhan mereka bergerak dalam bidang sosial dan kultural. Justru pada periode kemacetan dalam politik inilah umat Islam punya peluang yang baik sekali untuk melancarkan dakwah Islam dengan sasaran-sasaran yang lebih strategis.”
Hal ini tampak pada periode berikutnya :

Peiode ketiga; 1985 sampai sekarang. Pola hubungan berubah menjadi akomodatif, yaitu satu sama lain saling mengisi dan meminimalkan hubungan yang antagonik, bahkan cenderung menghindari konflik. Ungkapan seperti ”jangan mencampur adukkan Islam dengan politik. ”ekstrem kanan”, dan

¹⁵ *Ibid hal 27*

”kelompok sempalan” yang dulu sangat memojokkan Islam, periode ini tidak dikenal lagi.

Pihak pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dan produk hukum yang menguntungkan umat Islam. Beberapa di antaranya adalah pengesahan UU Pendidikan No. 2/1989, UU Peradilan Agama, dan SKB tentang Pendayagunaan Zakat; pemakaian jilbab di sekolah-sekolah, pendirian Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila dan Bank Muamalat; pencabutan SIUPP tabloid *Monitor*; pengiriman 1.000 da’i ke daerah-daerah transmigran; pembentukan ICMI; merekrut tokoh-tokoh Islam kedalam MPR (termasuk tokoh-tokoh yang selama ini dikenal sangat kritis terhadap pemerintah), serta banyaknya kalangan muslim yang duduk dalam kabinet. Selain itu, Presiden dan Wakil presiden sering membuka dan menutup muktamar lembaga-lembaga keislaman. Dari kasus-kasus tersebut tampak jelas adanya indikasi perubahan hubungan Islam dengan negara di bandingkan dengan periode sebelumnya.¹⁶



¹⁶ *Ibid* hal 27-28

Sementara itu dipihak Islam, sikap reaktif emosional terhadap kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti SDSB mulai ditinggalkan. Dalam pemilu, aspirasi politik umat Islam mulai bervariasi. Di Aceh, yang dikenal sebagai “Lambung Suara” PPP, Golkar berhasil menang dalam pemilu 1987 dan 1993. Kalangan ulama-pun mendukung kepemimpinan Pak Harto dan mengajukan usul mendahului PPP, termasuk Golkar agar ia tetap menjadi Presiden RI periode 1993-1998. Ikrar warga NU dalam “rapat sejuta orang” di lapangan parkir Timur Senayan, 1 Maret 1992, adalah indikator lainnya. Salah satu ikrar yang dibacakan oleh Drs.K.H. Bukhari Masruri (Ketua PW NU Jawa Tengah) tersebut berbunyi :

“Kami yakin bahwa Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah bentuk final negara kami. Karenanya, kami teguhkan tekad kami membangun dan mempertahankan derap dan langkah pembangunan bangsa kami.”

Keakraban Presiden Soeharto dengan sejumlah ulama terkemuka di Indonesia tampak jelas dengan di adakannya *halal bihalal* di antara mereka sehabis Idul Fitri 1994. Dalam kesempatan itu, Presiden Suharto meyakinkan para lama bahwa ia tidak akan berhenti di tengah jalan dalam menjalankan tugasnya.¹⁷

Para mahasiswa Indonesia juga tertarik dengan gagasan IM yang menjadikan Islam sebagai konsep alternatif untuk manghadapi perubahan. Perpindahan kekuasaan Soekarno kepada Soeharto pada tahun 1968 diikuti pula dengan perubahan cara pandang, sikap, dan gaya hidup bangsa Indonesia

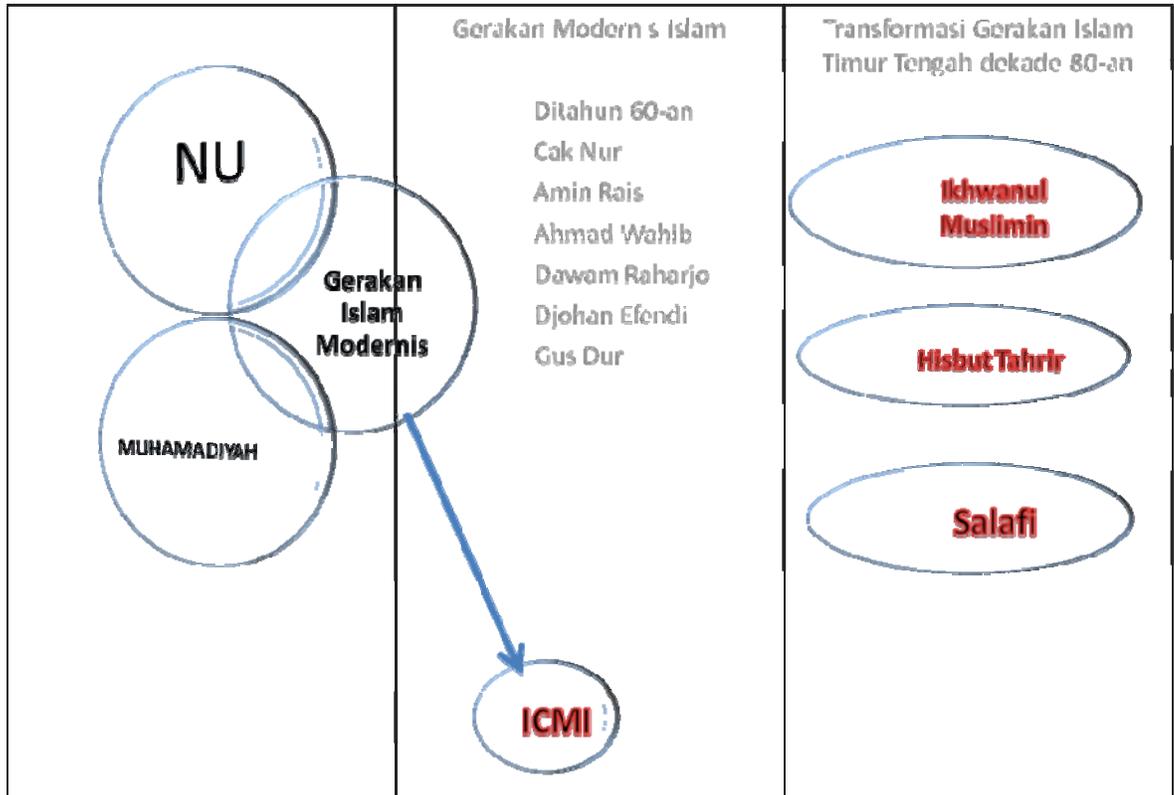
¹⁷ *Ibid* hal 28-29

yang semula anti Barat menjadi sangat pro Barat. Semua yang berasal dari Barat dipandang baik, sebab Barat pada dekade 1970-an dan 1980-an dijadikan simbol kemajuan pemerintah Orde Baru. Sebaliknya, Islam dijadikan sebagai simbol kemunduran dan simbol penentangan, sehingga Pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan represif terhadap kalangan Islam, sebagaimana telah di jelaskan oleh sub bab sebelumnya, bahwa sejak tahun 1976 pemerintah telah menangkap para tokoh Islam, dan juru dakwah serta membubarkan kegiatan pengajian yang dilanjutkan dengan menginterogasi panitia dominan yang berumur antara 17-25 tahun.

Mereka langsung ditahan oleh aparat keamanan. Semua kebijakan represif ini telah menempatkan Islam pada posisi tidak mempunyai pilihan lain kecuali melawan. Selama periode 1974-1985 perlawanan diberikan oleh organisasi Islam yang sudah mapan seperti Nahlatul Ulama dan Muhammadiyah. Perlawanan kalangan Islam disalurkan lewat melalui Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Namun, perjuangan melalui jalur parlemen dianggap kalangan muda Islam telah mengalami kegagalan setelah PPP, NU, Muhammadiyah, dan organisasi masa milik kalangan Islam lainnya menerima asas tunggal pancasila pada tahun 1985.¹⁸

¹⁸ Abdul Syukur. "*Gerakan Usroh Di Indonesia , Peristiwa Lampung 1989.*(Yogyakarta: Penerbit, Ombak, 2003) hal 37-38

Peta gerakan Islam



Gerakan Islam di Indonesia dimulai dari NU (tradisional), Muhammadiyah (modernis) di awal kelahiran. Setelah itu masuk Gerakan Islam modernis yang dipelopori dari beberapa tokoh seperti Cak Nur dengan kelompok limited group. Amin Rais dan. Setelah itu muncul gerakan yang merupakan transformasi gerakan Timur Tengah seperti Ikhwanul Muslimin, Hisbut Tahrir dan Gerakan Salafi dengan ciri-ciri *jalabiyah* (jubah panjang), *imamah* (serban), *isbal* (pantalon), *liyah* jenggot panjang yang hanya memikirkan dakwah non politis

Kalangan muda Islam merasa ditinggalkan, sehingga mereka memutuskan hubungan organisatoris terhadap organisasi Islam yang sudah mapan itu guna melanjutkan pertentangan terhadap gagasan Pemerintah Orde Baru untuk membentuk Pribadi, Masyarakat, dan Negara Pancasila. Mereka berusaha melakukan *counter idea* dengan menawarkan gagasan pembentukan *syaksiyah al-Islamiyah* (Pribadi Islam), *usroh al-Islamiyah* (Keluarga Islam), *ijtimaiyah al-Islamiyah* (Masyarakat Islam), *daulah al-Islamiyah* (Negara Islam) dan *Khilafah al-Islamiyah* (Persatuan Umat Islam seluruh Indonesia) dari gerakan IM.

Kalangan muda Islam di Indonesia tidak hanya tertarik dengan lima gagasan IM tetapi juga konsep gerakan IM dalam menghadapi pemerintahan yang represif. Pada tahun 1943 pimpinan IM menciptakan pola gerakan usroh untuk mengantisipasi kebijakan pemerintah kolonial Inggris.¹⁹

Salah satu gerakan *revivalis* Islam yang paling menonjol pada saat itu adalah dengan banyak munculnya kelompok-kelompok pengajian Usroh. Kemunculan kelompok-kelompok Usroh ini dalam tahap pertamanya adalah ditandai dengan pembentukan kelompok-kelompok kecil (*usroh*) yang banyak terdapat di kampus-kampus ternama di Indonesia pada awal 1980-an. Kelompok-kelompok pengajian usroh pada tahap awalnya dikembangkan di Masjid Salaman ITB, selanjutnya mengalami beberapa pergeseran kepada pola gerakan yang diilhami langsung dari pergerakan Ikhwanul Muslimin.

¹⁹ *Ibid hal 38*

Pergeseran ini muncul setelah kedatangan para alumni Timur Tengah sejak tahun 1983-1984.

Usroh merupakan sebuah metode perlawanan kelompok-kelompok muda Islam terhadap kekuasaan Pemerintah Orde baru. Usianya hanya lima tahun, yakni tahun 1980-1986. Gerakan *usroh* terdiri dari kelompok-kelompok pengajian yang tersebar di mesjid-mesjid (lingkungan tempat tinggal, sekolah, dan kampus).²⁰

Usroh pada dasarnya merupakan satu kelompok pengajian kecil yang berjumlah 10 orang dengan keanggotaan bersifat homogen baik dari segi latar belakang pendidikan, jenis kelamin maupun usia. Sesama anggota *usroh* diharuskan untuk melakukan *ta'aruf* (saling mengenal) *tafahum* (saling memahami) dan *tafakul* (saling membantu). Jadi, diantara anggota *usroh* tidak hanya mengenal identitas pribadi teman satu *usroh*nya, tetapi juga memahami latar belakang sosial, ekonomi, politik, dan pendidikannya. Disegi pemenuhan kebutuhan materi teman satu *usroh* beserta keluarganya apabila yang bersangkutan mengalami kesulitan, misalnya terkena kehilangan pekerjaan atau ditangkap oleh aparat keamanan. Sumber pemasukan utama kelompok *usroh* berasal dari sumbangan rutin, zakat penghasilan 2,5 %, dan usaha bersama.

Usroh merupakan sebuah konsep untuk membentuk kader-kader IM. Mereka diperkenalkan prinsip-prinsip dasar perjuangan IM. Mereka diperkenalkan prinsip-prinsip dasar perjuangan IM untuk menerapkan syari'ah

²⁰ Agung Pardini, *Majalah Islam Sabili Media Revivalis Gerakan Tarbiyah (1988-1993)*.

Islam dalam kehidupan sehari-hari mulai dari kehidupan pribadi hingga pengelolaan negara sebagaimana telah penulis singgung di awal tadi. Dalam rangka mencapai tujuan itu, maka diciptakan metode pengkaderan yang terdiri dari *tauji* (pengarahan), *tarbiyah* (pembinaan), *tadrib* (pelatihan), dan *taqwim wa a-mutaba'ah* (evaluasi dan kontrol). Semua metode ini diterapkan dalam pertemuan rutin dan pertemuan khusus. Pertemuan rutin diadakan di rumah anggota *usroh* secara bergantian, sedangkan pertemuan khusus diadakan di luar kota. Pertemuan khusus itu sendiri terdiri dari kegiatan *mabit* dan *rihlah*.²¹

Pengertian *mabit* ialah melakukan kegiatan sehari-hari secara bersama-sama dalam satu tempat selama beberapa hari, dan pengertian *rihlah* adalah mengadakan perjalanan jauh untuk mengenal lingkungan. Keanggotaan *usroh* dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan pertimbangan geografis. Pembagian ini untuk memudahkan penyelenggaraan kegiatan *daurah*, yaitu pertemuan rutin di antara kelompok *usroh* dalam satu wilayah geografis. Kegiatan yang bersifat masal selain *daurah* adalah *inadwah* dan *muktamar*.

Semua kegiatan ini bergantung pada keberhasilan pembentukan kelompok-kelompok *usroh*. Pimpinan *usroh* disebut *naqib*. Peran *naqib* sangat penting. Ia menjadi menjadi kepala keluarga dan sekaligus guru bagi para anggota *usroh* dengan pimpinan tertinggi. Jadi anggota *usroh* tidak bisa berhubungan secara langsung dengan pimpinan di atas *naqib*. Begitu juga dengan *naqib*, ia tidak dapat berhubungan langsung dengan pimpinan

²¹ Abdul Syukur. "Gerakan *Usroh* Di Indonesia , Peristiwa Lampung 1989.(Yogyakarta: Penerbit, Ombak, 2003) hal 38-39

tertinggi. Hubungan bertingkat ini untuk menghindari kehancuran gerakan apabila salah seorang anggota *usroh* ditangkap aparat keamanan, sebab yang bersangkutan tidak bisa memberikan informasi.²²

Penulis tidak dapat data yang meyakinkan tentang waktu dan individu pertama yang menyebarkan lima gagasan Ikhwanul Muslimin beserta konsep gerakan *usroh* di Indonesia hanya menyebutkan cara penyebaran, yaitu (i) diperkenalkan oleh para alumni perguruan tinggi dari Timur Tengah (tampa menyebut nama alumni yang dimaksud), (ii) dipelajari melalui buku-buku tentang Ikhwanul Muslimin terutama dari literatur berbahasa Inggris.²³

Ketua PB (Pengurus Besar) PII (Pelajar Islam Indonesia) 1983-1986, Mutammimul Ula, termasuk seorang penganjur utama pembentukan gerakan *usroh* di Indonesia setelah mengikuti *Internasional Islamic Student Leadership Camp* di Kuala Lumpur, Malaysia, antara tanggal 7-14 Desember 1982. Ia sangat terkesan dengan keberhasilan organisasi kalangan muda Malaysia, ABIM, dalam menerapkan konsep *usroh* gerakan IM untuk menghadapi pemerintah Malaysia yang represif.

Dalam sejarah dakwah Islamiyah di Malaysia, ABIM merupakan gambaran yang paling banyak mengalami tekanan sejak kelahirannya. Tokoh-tokoh ABIM pernah ditahan di bawah ISA, dibuntuti oleh polisi dan sebagainya. Dan terakhir, diperintahkan agar ABIM memutuskan hubungannya dengan badan-badan di luar negeri. Salah satu kekuatan yang dimiliki ABIM adalah model kegiatannya yang disebut *Usroh*. Lewat *Usroh*

²² *Ibid hal39*

²³ (wawancara dengan *Zainal Muttaqin* (L. 19963) pada 17 juli 2000 di Jakarta. Ia mantan Sekretaris Umum PII PW Jakarta Raya 1981-1983 dan aktivis kelompok tarbiyah generasi awal.

tumbuhlah sikap solidaritas yang kokoh dan keikhlasan mengamankan Islam secara pasti.²⁴

Secara tersirat, Ula menganjurkan agar aktivis muda Islam khususnya anggota PII mengikuti langkah ABIM membentuk pola gerakan *usroh* untuk mangantisipasi kebijakan represif Pemerintah Orde Baru. Perlu diketahui bahwa Ula bukanlah orang yang pertama yang menganjurkan pembentukan *usroh* di Indonesia. Hanya saja tulisannya majalah *kiblat* tahun 1983 merupakan bukti yang diperoleh penulis. Pada edisi yang sama, majalah *kiblat* juga menurunkan berita tentang aktifitas pengajian mahasiswa Universitas Indonesia yang mirip dengan konsep gerakan *usroh*.

Pengajian serupa juga diadakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan Forum Study Islam yang diadakan setiap hari Sabtu di ruangan atomi, kampus Salemba (*kiblat*) Informan penulis yang *drop out* dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (1983-1986) menjelaskan kepada penulis bahwa sebenarnya hampir semua Fakultas dalam lingkungan Universitas Indonesia membentuk kelompok pengajian tersendiri dengan kapasitas keanggotaan terbatas, tidak lebih dari 15 orang.²⁵

Di setiap bulannya, mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dari berbagai Fakultas sebahagian berkumpul mengadakan pengajian dengan mengambil tempat di rumah salah seorang di antara mereka secara bergiliran,

²⁴ Mutammimul Ula, “*ABIM Sebuah Model Gerakan Islam*” dalam majalah *Kiblat No./XXX* edisi 20 April- 5 Mei 1983, hal. 29-31 (Mutammimul Ula (L. 1956) pada 14 November 2000 di Jakarta. Ia adalah mantan Ketua Umum PB PII 1983-1986 dan merupakan salah seorang penganjur penerapan pola gerakan *usroh* di Indonesia, khususnya di lingkungan PII.

²⁵ Wawancara dengan Zainal Muttaqin (L. 19963) pada 17 juli 2000 di Jakarta. Ia mantan Sekretaris Umum PII PW Jakarta Raya 1981-1983 dan aktivis kelompok tarbiyah generasi awal

tergantung siapa yang mau menjadi 'shahibul bait', *Pekumpulan pengajian yang bersifat "door to door"*, dari rumah kerumah, sudah berlangsung dua tahun lebih.²⁶

B. Menjamurnya Pers Islam Di Indonesia

Sekalipun kemajuan teknologi visual mendahului perkembangan teknologi percetakan, keberadaan media cetak sulit untuk di hapuskan. Benar bahwa media visual-tv, satelit, parabola, dll menawarkan banyak keunggulan seperti berita hidup dan faktual, serta waktu siaran yang panjang. Namun media cetak di butuhkan oleh masyarakat, karena memiliki faktor yang sulit di abaikan, seperti harga yang terjangkau, berita yang bisa dibaca berulang-ulang dan dalam waktu tak terbatas dibandingkan dengan tv yang memiliki limit siaran serata fungsinya yang mendokumentasi segala berita dengan ongkos murah. Hal yang sama berlaku beda dengan pers lainnya, pers Islam memiliki nilai lebih yang tak dimiliki media lain, yaitu adanya pembaca fanatik yang selalu butuh informasi shahih yaitu tentang ke Islaman.²⁷

Pers Indonesia memiliki latar belakang sejarah yang erat berhubungan dengan pergerakan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan nasional, dan dengan itu perjuangan untuk memperbaiki kehidupan rakyatnya. Meski posisi dan peranan pers mengalami pergeseran sesuai dengan perkembangan sejarah negara dan sistem politiknya, namun pers Indonesia memiliki karakter yang konstan, yakni komitmen sosial-politik yang kuat.

²⁶ *Kiblat* hal 30

²⁷ (*SABILI, Profil Pers Islam No.05/Th. V 20 Oktober 1992* hal 45.)

Kuatnya intervensi negara telah mengakibatkan pers kurang mempresentasikan realitas yang ada dikalangan masyarakat luasnya (*grass root mass*). Pers menghadapi banyak kesulitan ketika mereka dituntut untuk melakukan fungsi-fungsi yang diembannya, khususnya fungsi-fungsi mereka terhadap masyarakat. Sebagaimana dinyatakan:

1. Pers menampilkan informasi yang berdimensi politik lebih banyak dibandingkan dengan ekonomi, dengan didominasi subyek negara.
2. Kecenderungan pers lebih berat ke sisi negara dilakukan dengan cara lebih memilih realitas psikologis dibanding dengan sosiologis.

Tekanan kekuasaan telah memaksa pers untuk selalu beradaptasi dengan kepentingan kekuasaan tersebut. Manifestasinya adalah isi pers menjadi cenderung seragam, memberikan lebih banyak ruang dan waktu yang tersedia bagi kepentingan kekuasaan, lebih mengutamakan informasi yang bersifat politik, kualitas isi yang rendah, dan lain-lain. Bagi pers yang melanggar ketentuan-ketentuan dari regulasi yang ada, kepada mereka dikenakan sanksi, yakni dari tingkat peringatan, pemberhentian penerbitan, sampai dengan menutup lembaga pers yang bersangkutan selama-lamanya.²⁸

Media massa umumnya tunduk pada sistem pers yang berlaku di mana sistem itu hidup, sementara sistem pers itu sendiri tunduk pada sistem politik yang ada. Dengan kata lain, sistem pers merupakan sub sistem dari sistem politik yang ada. Maka dalam setiap liputan pemberitaan dengan sendirinya akan memperhatikan keterikatan tersebut.

²⁸ Amir Purba. *Perkembangan Kehidupan Pers Dari Masa Rezim Orde Baru Ka Masa Rezim Reformasi*

Pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), yang berkali-kali dilakukan rezim Orde Baru, hakekatnya adalah sama dengan pembreidelan, karena itu dilakukan atas alasan isi pemberitaan. Padahal UU Pokok Pers tegas mengatakan tidak ada pembreidelan. Di Indonesia, kalau berbicara tentang "kebebasan pers", maka kita kenal sebutan "Pers Pancasila" Di sini akan terlihat, bagaimana Pancasila "di obral" dan dijadikan dalih untuk melegitimasi berbagai tindakan dan praktek pembatasan kebebasan pers.

Sidang Pleno XXV Dewan Pers pada bulan Desember 1984 merumuskan Pers Pancasila sebagai berikut : " Pers Indonesia adalah Pers Pancasila dalam arti pers yang orientasi, sikap dan tingkah lakunya berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ". Hakekat Pers Pancasila adalah pers yang sehat, yakni pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif.

Kalau mengacu buku Sistem Pers Indonesia, disebutkan akar dari sistem kebebasan pers Indonesia adalah landasan idiil, ialah Pancasila, dengan landasan kontitusional, UUD 1945. Kemudian disebutkan, pers adalah salah satu media pendukung keberhasilan pembangunan. Bentuk dan isi pers Indonesia perlu mencerminkan bentuk dan isi pembangunan. Kepentingan pembangunan nasional. Inilah yang disebut "pers pembangunan," model yang juga banyak diterapkan di negara berkembang lainnya.

Meski sepintas kedengarannya juga masih bagus, implikasinya adalah : karena pembangunan dianggap sudah merupakan program rezim Orde Baru, maka pers harus mendukung pemerintah Orde Baru. Pers sangat tidak diharapkan memuat pemberitaan yang isinya bisa ditafsirkan tidak sejalan atau bertentangan dengan posisi pemerintah.

Dalam prakteknya, itu ditentukan oleh pemerintah sendiri. Dan karena pemerintah sangat dominan dalam berbagai aspek kehidupan sosial-politik, ini sangat membuka peluang bagi penyelewengan dan pembatasan kebebasan pers. Pemerintah (Deppen) bertindak sebagai jaksa, hakim dan sekaligus algojo, dalam membungkam pers yang dianggap ”melanggar batas”²⁹

Pada tahun 1991 DPR untuk pertama kalinya mengadakan dengar pendapat dengan sejumlah redaksi surat kabar dan majalah nasional. Dalam acara itu insan pers menyatakan kebersamaan mereka atas peraturan Menpen nomor 01 tahun 1984 yang diantaranya berisi tentang kewenangan Menpen membatalkan SIUPP. Dari acara yang memakan waktu lima jam lebih itu, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan kita.

Pertama, pengakuan kalangan DPR maupun pers sendiri tentang adanya ketidakjujuran selama ini, DPR dan pers seringkali lebih banyak sebagai juru bicara pemerintah ketimbang menyuarakan aspirasi masyarakat iklim yang ada, kerap membuat banyak aspirasi masyarakat jadi mandeg, tak mendapat saluran semestinya. Disisi lain, kualitas anggota DPR dan insan pers sendiri memang masih memprihatinkan. Banyak para ”wakil rakyat” yang

²⁹ *Komunikasi Politik dalam Pers Indonesia*, Wednesday, 19 November 2008 06:22 http://www.um-pwr.ac.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=222:komunikasi-politik-dalam-p

menempatkan dirinya sebagai "orang gajian" dari pada berperan sesuai dengan prediket yang disandangnya. Sementara dikalangan pers, banyak banyak para jurnalis yang menekuni dunia pers lebih sebagai lahan pencari nafkah, ketimbang dorongan idealisme maka tak heran kalau kebanyakan perusahaan pers dan pelakunya dan pelakunya lebih suka mencari selamat dari pada menanggung resiko karena memperjuangkan sesuatu.³⁰

Kedua, ternyata dialog tersusun tidak menukik pada perasaan yang lebih mendasar yakni keberadaan lembaga SIUPP. Padahal Undang- Undang pers jelas-jelas menyebutkan bahwa untuk penerbitan pers tidak diperlukan izin. Sikap para pimpinan redaksi surat kabar dan majalah yang hanya Permen No:01 yang mengatur ketentuan SIUPP itu sendiri cukup membuat kita bertanya-tanya.

Ada dua keuntungan yang adanya ingin dicapai pengusaha pers melalui tuntutan-tuntutannya. Pertama menjadi leluasa mengembangkan jaringan pers tanpa ada kekhawatiran SIUPPnya bakal dicabut. Dan hal ini pada beberapa hal bisa berbahaya sebab provokasi-provokasi semacam monitor dan SARA bisa saja terulang kembali tanpa sungkan-sungkan. Apalagi isi mayoritas media cetak sekarang ini cenderung bertabrakan dengan akhlak dan moralitas Islam. Kedua tetap di berlakukannya SIUPP membuat insan pers yang beridealisme tinggi tapi miskin modal, sulit berkiprah. Akibatnya banyak potensi-potensi jurnalis muslim yang mubazir hanya

³⁰ M. Ishaq (Zainal Muttaqin), *Pengorbanan Persatuan Masa Depan Umat, Keterbukaan dan Kebebasan*, Sabili no: 41 th III 20 Juni - 4 Juli 1991 hal 1

lantaran berkocek tipis. Apalagi syarat-syarat pemberian SIUPP tidak semata berdimensi ekonomi tetapi juga politis. Sulitnya mendapatkan SIUPP mengurangi pesaing-pesaing baru bagi raksasa pers yang ada.

Maka, kekhawatiran bila ternyata ungkapan yang disampaikan para pemred tidak lebih dari upaya mempertahankan status quo, agar kerajaan pers yang mereka genggam tidak diusik. Menjadi harapan kita bersama, khususnya jurnalis muslim, agar keterbukaan kebebasan yang kita tuntut bukanlah liberalisme barat, tetapi keterbukaan dan kebebasan yang memungkinkan setiap insan pers bisa mengekspresikan pikiran-pikirannya dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara wajar dan proposional tanpa dihantui ketakutan.

Semestinya di tinjau kembali bukan hanya permen no. 01 Th 1984, tetapi yang keberadaan SIUPP itu sendiri. Dalam era keterbukaan dan globalisasi sekarang ini, adalah tidak relevan bila ketentuan-ketentuan yang tak bernafas tetapi di pertahankan. Biarkanlah semua insan pers menilai eksistensi dan mutu suatu penerbitan pers. Ada gilirannya hanya mereka yang memiliki idealisme, independensi, integritas, pribadi dan profesionalisme saja yang bisa bertahan dalam kanzah pers kita. Dan mereka mengabaikan faktor-faktor di atas secara alamiah akan kehilangan pembaca.

Apabila iklim keterbukaan yang sehat ini diberikan secara leluasa, kita yakin pers Islam dapat berkiprah dengan baik dengan baik dan meyakinkan. Masyarakat yang mempunyai keleluasaan memilih bacaan yang terbaik, aspirasi dan bermutu, tentu lebih baik dari pada masyarakat yang terpaksa

membaca sesuatu semata-mata karena ia memang harus membaca tanpa ada pilihan lain.³¹

Aktivitas-aktivitas keislaman tampil marak. Kegiatan-kegiatan semacam seminar, pesantren kilat, telaah buku dan sebagainya, merebak tidak hanya dikalangan akademisi, tetapi merasuki keberbagai pusat kegiatan masyarakat. Gelombang baru ini tentunya membutuhkan dukungan informasi yang lebih jernih dan Islami. Pers Islami sebenarnya yang harus memaparkan dinamika dan nilai Islam sehingga dampak dan pengaruhnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Tetapi kenyataan berbicara lain. Gerak penyebaran aktifitas Islam tidak diimbangi tumbuhnya media Islami. Beragam media yang berlabel Islam berada dalam kondisi hidup segan matipun enggan. Justru media masa yang jauh dari nilai-nilai Islam yang terus melaju dan berkembang.

Selain peran pembawa aspirasi Islam, keberadaan pers Islam dapat menjadi filter informasi yang dapat memilah antara yang haq dan kabur. Ia dapat menjadi bekal bagi masyarakat untuk menganalisa perkembangan dari sudut pandang yang Islam. Dalam cakrawala yang lebih luas permasalahan pers dalam Islam sebenarnya menyimpan konflik lain. Kesadaran informasi semakin menipis dalam tatanan masyarakat. Hampir seluruh jalur informasi dikuasai oleh non Islam. Sehingga seluruh kejadian tidak lepas dari produk mereka. Karenanya tidak mengherankan bila kerap terjadi manipulasi berita dan pemutarbalikan fakta. Misalnya, media massa tidak pernah jemu

³¹ *Ibid*, Sabili no: 41 th III 20 Juni - 4 Juli 1991 hal 1

mewartakan dan membesarkan perbedaan pendapat diantara muslim di berbagai belahan dunia.³²

Majalah Sabili yang memegang SIUPP dan STT

<u>Pers Islam Dalam Data :</u>	
Pemegang SIUPP:	Pemegang STT:
● Panji Masyarakat	- Media Dakwah
● Kiblat	- Suara Masjid
● Panggilan Adzan	- Serial Khutbah Jum'at
● Amanah	- Bulletin Dakwah
● Harmonis	- Ulumul Qur'an
● Aku Anak Soleh (Jakarta)	- Mimbar Ulama
● Adil (Surabaya)	- Jum'at
● Sinar Darussalam (Aceh)	- Salam
● Suara Muhamadiyah(Yogyakarta)	- Suara Hidayatullah
● Al-Chairaat (Palu)	

Tabel. 1

Upaya membangun pers Islam merupakan pers Islam merupakan kerja besar yang tabu untuk ditunda. Kekuatan iman dan kecerdasan mengharuskan hadirnya pers Islam yang mampu tampil kokoh dengan dukungan visi, komitmen dan profesionalisme yang utuh. Namun beberapa kendala yang menghadang harus dibenahi terlebih dahulu.

Pertama, kekaburan *definitive* tentang hakikat pers Islam itu sendiri. Selama ini, setiap pengelola pers Islam lebih sering menafsirkannya sesuai

³² (Sabili, *Pers Islam Maju kena Mundur Kena*, No.05/Th. V 20 Oktober-5 November 1992, hal: 37 – 38)

dengan kepentingan masing-masing. Dalam 12 media yang ber SIUPP dari 275 yang tercatat, ternyata sulit menemukan media yang mencerminkan komitmen yang jelas terhadap nilai-nilai Islam, baik dari segi pengelolaan maupun bentuk jadinya. Sehingga sulit dibedakan antara pers Islam dengan pers jahiliah.

Kedua, tumpang tindihnya segmen pembaca yang menjadi sasaran masing-masing media massa Islam. Dian R. Basuki mencontohkan, ada beberapa majalah Islam yang saling berebut pasar pembaca pada segmen yang sama. Di satu sisi, gejala ini jelas mempengaruhi kedewasaan masyarakat dalam berhadapan dengan informasi, karena mendapat sajian dalam cakupan pola pikir yang sama, Sementara dari sudut perkembangan bisnis, kondisi ini malah dapat saling melemahkan,”Keadaan ini membawa kita menggerogoti diri sendiri” kata Dian.

Ketiga, rendahnya etos dan semangat kerja professional. Cukup langka menemukan media masa Islam yang mampu tampil memikat tanpa melanggar batasan syariah. Padahal umat Islam memunyai sumber daya yang besar.

Keempat, Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) merupakan tembok besar yang sering membuat umat Islam terpentok dan terseok ketika mencoba membangun pers Islam yang kuat. Persyaratan dukungan dana yang cukup besar-konon diatas angka ratusan juta membuat tak sembarang orang mampu menyediakannya, SIUPP telah menjadi kendala, bukan kendali.³³

³³ *Ibid hal 39*

Pers Islam dan Kebangkitan Umat

Pers Islam menjadi sangat penting dalam Era globalisasi informasi . Kita tak bisa berdiam diri menghadapi arus informasi yang semakin deras. Ada beberapa strategi yang mengharuskan kita membangun pers Islam yang kuat.

Pertama, pers Islam mampu menjadi alat untuk mencerdaskan umat. Jangkauan yang luas, harga yang murah dan frekuensi yang tinggi merupakan nilai lebih yang data mempengaruhi umat dalam skala besar. Kedua, sebagai counter (balasan) terhadap isu dan informasi sesat yang di lancarkan musuh-musuh Islam. Ketiga, mengarahkan dan membimbing umat dalam melaksanakan ajaran Islam. Disamping itu, perannya sebagai pemersatu umat tak dapat diabaikan, melalui pers Islamlah kehidupan yang berkotak-kotak akhir-akhir ini bisa direkayasa dan ditata sebagai suatu komunitas ideal.

Kokohnya pers Islam akan mengimbangi informasi dan luar informasi dari luar. Karena tak dapat disanggah lagi, pers Barat (Non Islam) mempunyai jaringan informasi struktural yang kuat. Sebutlah diantaranya, Reuter, AFP, AP,UPI, dan sebagainya, yang sulit ditandingi dalam waktu dekat. Sementara kantor berita Islam (Internasional Islamic News Agency) sangat lemah kemampuannya.³⁴

Langkah Strategi Pers Islam

Ada beberapa langkah dan Strategi dalam membangun Pers Islam. Pertama, Pers Islam harus membangun citranya yang jelas sebagai media yang

³⁴ *Ibid hal 39- 40*

berdasarkan ajaran Islam. Tak bisa dipungkiri, menjauhnya para pembaca pers Islam karena mereka tidak menemukan citra Islam pada media tersebut. Kedua, terpaksa atau tidak, sudah saatnya meleskan diri dari asshobiyah golongan dan kelompok. Pers Islam bukanlah corong dungu yang menyuarakan kepentingan kelompok tanpa mempedulikan keabsahan berita. Semuanya harus berusaha arif: tidak merasa paling benar atau menyikut sesama hanya karena prioritas golongan. Ketiga, masalah pendanaan yang sering menjadi kendala utama dalam jajaran pers Islam.

Ada nasehat sederhana Roger Garaudy, cendikiawan Muslim Prancis, ketika menyarankan potongan dana satu sen dari hasil setiap barel minyak Timur Tengah perhari. Kalau itu terwujud amat suku menandingi derasnya Zionis. Nasehat sederhana ini bisa menjadikan bahan pemikiran setiap pengelola pers. Konglomerat muslim atau masyarakat muslim sendiri. Tanpa saling membantu, rasanya susah menempatkan pers Islam sebagai penyangga kebangkitan umat.

Semoga pers Islam yang juga sebagai pemicu kebangkitan Islam benar-benar menjadi pencatat segala kejadian yang amanah seperti diisyaratkan Allah SWT dala firmanNya:

“...agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaanya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatannya itu”(Qur’an Suci Al Hujurat:6)³⁵

³⁵ *Ibid hal 40*

Ada beberapa faktor lain yang menentukan tingkat keberhasilan pers Islam menjalankan misinya :

Pertama, pers Islam haruslah pers memahami secara jelas dan jernih beban dan misi apa yang hendak disodorkan kepada para pembaca. Artinya harus ada visi dan rumusan yang jelas yang memuat karakter sebuah pers yang berlabel Islam. Tak hanya nama yang Islami tetapi juga isi, gaya tulisan, penampilan dan manajemen harus mencerminkan nilai-nilai Islam. Kejelasan visi akan menjaga pers Islam mampu memilah mana yang baik untuk diberitakan dan mana yang harus disimpan. Tak ada percampuran *al haq* dan *al bathil* baik dalam tulisan maupun dalam gambar yang disajikan. Bagaimanapun barang campuran kurang diminati dibandingkan dengan barang yang asli.

Kedua, pers Islam digerakkan oleh manusia-manusia yang berkualitas. Orang-orang yang berkecimpung didunia da'wah sekaligus menguasai seluk beluk dunia jurnalistik sangat jarang bila tidak dikatakan langka. Sebab itu harus ada diantara kita yang bersedia melakukan "spesialisasi menggeluti dunia jurnalistik secara profesional. Jalan kearah itu memang memang tidak mudah. Tapi apa salahnya kalau di coba? Aspek usaha dan manajemen juga tidaklah pentingnya. Dibutuhkan tenaga khusus untuk membenahi hal itu.

Ketiga, aspek penyajian dan penampilan, pers Islam terkesan kumuh jika dibandingkan dengan dengan pers yang lain. Oleh karena itu sudah saatnya untuk menampilkan citra yang laih baik. Kualitas penyajian yang meliputi cover tata letak, aktualitas tulisan dan gambar harus ditingkatkan.

Bila ini bisa dibenahi, lambat laun penampilan pers Islam akan semakin baik. Dengan demikian gambaran pers Islam yang di garap asal jadi tidak mampu memperhatikan kaidah jurnalistik yang baik dan benar terhapus dengan sendirinya.

Keempat, aspek manajemen, Sulit menampilkan citra pers Islam tanpa membenahi aspek manajemennya. Pers Islam bagaimanapun merupakan sarana jihad yang tidak boleh diabaikan. Informasi-informasi akurat yang disajikan sangat mendukung gerak perjuangan Islam. Oleh karena itu pengelolaan pers Islam tak bisa dilaksanakan asal jadi. Ia membutuhkan persiapan, arah dan sasaran serta komponen lain yang pendukungnya layaknya sebuah gerakan jihad yang lain.

Kelima, Pers Islam harus memiliki jaringan informasi. Kredibilitas sebuah sebuah pers banyak ditopang oleh oleh kekuatan jaringan informasi yang rapi dan jelas agar aktualitas dan kualitas berita yang disampaikan terjaga. Karena ketiadaan jaringan informasi inilah seringkali umat Islam terjebak dalam informasi yang bias (menyimpang) yang memang sengaja diputar balikkan musuh-musuh Islam. Tugas pers Islam untuk memberikan informasi yang benar kepada umat.

Hal yang sama berlaku beda dengan pers lainnya, pers Islam memiliki nilai lebih yang tak dimiliki media lain, yaitu adanya pembaca fanatik yang selalu butuh informasi shahih yaitu tentang keislaman. Selain faktor emosional diatas, ada beberapa faktor lain yang menentukan tingkat keberhasilan pers Islam menjalankan misinya.

Keenam, dukungan sumber dana, kerja pers merupakan bidang yang utuh investasi yang cukup besar. Penyiapan perangkat keras dan lunak serta upaya riset pasar membutuhkan dukungan dana yang cukup.³⁶

Suara Hidayatullah juga mendapat pangsa pasar cukup luas. Cita-cita media yang terbit pertama kali tahun 1988 ini mengusung ide-ide penerapan syariat Islam. Mulanya *Hidayatullah* diterbitkan sebagai media komunikasi pengurus pusat Pesantren Hidayatullah, pesantren berdiri pada 7 Januari 1973, dengan cabang-cabangnya di berbagai provinsi. Pendiri dan pengasuhnya awal pesantren, Abdullah Said (alm), tokoh yang aktif dalam dakwah Islam. Said juga tercatat sebagai pengurus Muhammadiyah untuk urusan dakwah dan pengkaderan. Dalam mengelola pesantren, ia dibantu lima orang ustad: Usman Palese dari Pesantren Persatuan Islam Bangil Jawa Timur, Hasan Ibrahim dari pesantren Krapyak Yogyakarta, Hasyim HS dari Gontor Ponorogo Jawa Timur, Nazir Hasan dan Kisman dari Akademi Tarjih Muhammadiyah.

Tahun 2000, lewat Musyawarah Nasional I tahun 2000, Hidayatullah diarahkan lebih profesional dan terbuka. Sejak itu ia diputuskan menjadi salah satu badan usaha di bidang pers ormas tersebut. Secara sederhana media-media masa Islam yang tumbuh di pasar nasional saat itu (1998-2001) bisa dipilah dalam dua kategori. Pertama, “media islamis” yang mengusung isu-isu penegakan syariat Islam, Jihad, Zionisme, Anti-Amerika. Kedua “media populer” yang menyajikan isu-isu keislaman dengan pendekatan yang lebih

³⁶ (SABILI, *Profil Pers Islam* No.05/Th. V 20 Oktober 1992 hal 45-46.)

populer dan cocok dengan nilai-nilai kemoderenan. *Sabili, Hidayatullah, Media Dakwah* masuk dalam kategori pertama.³⁷

C. Peta Pers Islam

1. Suara Hidayatullah

Pada tanggal 13 Mei 1982 terbit nomor perdana Buletin Da'wah sebagai cikal bakal Suara Hidayatullah mulai terbit. Buletin ini dicetak sebanyak 500 eksemplar. Kemudian September 1986 terbit dalam bentuk majalah ukuran kecil setebal 88 halaman, tetapi mendapat teguran dari Departemen Penerangan (Deppen) karena belum mengantongi Surat Tanda Terbit (STT). Setelah delapan bulan keluarnya izin penerbitan (STT) dari Deppen tahun 1986, majalah 'Suara Hidayatullah' terbit tepatnya pada tanggal 15 Oktober 1987. Abdullah Said merealisasikan cita-cita dan harapan hadirnya sebuah media massa milik Pondok Pesantren Hidayatullah.

2. Majalah Islam Mimbar Tatsqif: menuju Insan Bertaqwa & Berwawasan.

Majalah Tatsqif merupakan majalah yang memuat informasi tentang kesilaman dalam corak pemikiran yang menampakkan pentingnya simbolisasi Islam dalam berbagai bidang kehidupan. Majalah yang terbit sebulan sekali ini diterbitkan oleh penerbit Yayasan Al-Mimbar dengan alamat Redaksi: Ruko Niaga Kalimas 2 Blok A-9/10, Jln. K.H oer Ali – Inspeksi kalimalang Setia Darma Tambun bekasi Tepl/Fax 021

³⁷ <http://alamsyahdjafar.wordpress.com/2008/08/27>

88374795.email: majalah.tastqif@yahoo.com movi_centre@yahoo.com

dibawah kendali pimpinan Redaksi J. Juju Zubeir, A.Md.

Pada edisi 36 Tahun 5 Februari 2009 ditemukan kerangka pemikiran dan bahasan yang disajikan meliputi:

- a. *Buhust* (telaah utama); Pokok bahasan yang dimuat disini adaah isu-isu penting yang sedang hangat diperbincangkan medianya, khususnya yang berkaitan dengan perjuangan gerakan keislaman dan umat Islam. Edisi nomor 6 ini memuat tentang Muslim Moro Filipina dengan segala informasi yang terkait dengan suku Moro itu.
- b. *Hiwar* (wawancara); Bahasan tentang hiwar atau wawancara biasanya berhubungan dengan isu pokok yang dibahas dalam buhust (tajuk utama) dengan mengutip atau menampilkan tokoh-tokoh atau aktivis umat yang dinekal lugas, tegas dan cendrung blak-blakan atau mengkritik musuh-musuh Islam.
- c. *Khidmah* (Pelayanan). Tajuk ini berisikan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan umat dalam aspek pendidikan, perdagangan, bisnis, dan kebutuhan lainnya.
- d. *Thulabiyah* (Pelajar). Bahagian ini menginformasikan tentang pelajar, siswa atau santri dalam dan luar negeri yang berprestasi atau bisa juga karya tulis pelajar yang dipublikasi untuk menjalin silaturahmi antar aktivis muslim.
- e. *Siyasah* (Politik). Tulisan di bahagian politik biasanya mengupas tentang seluk beluk perpolitikan Islam sejak masa klasik sebagai

landasan teori sampai pada masa moderen. Kajian tentang bagaimana perpolitikan Islam dan umat Islam di tanah air dibahas dalam topik ini. Bahasan tersebut cenderung dari sisi kepentingan kelompok yang lebih terbatas. Bahasan lain adalah *Tarbiyah Muslimah* (Pendidikan perempuan), *Akhbar alami* (Dunia Islam), *Madah tarbiyah* (Materi Tarbiyah), *Istifta* (Tanya Jawab) dan *Nadzrot* (Pandangan).

3. *Tarbawi Menuju Keshaliahn Pribadi dan Umat*, Penerbit PT. Media Amal Tarbawi, edisi 201. Thn 10 Rabiul Akhir 1430H, 16 April 2009, pimpinan Redaksi Ahmad Zairofi AM, terbit hari Jum'at dua pekan sekali. Alamat Redaksi Jln.Pramuka Jati No.430A, Kakarta Pusat 10440. Telp. 021-3153003. harga Rp.9000. email: tarbawi@yahoo.com.

Isi Majalah: Tahiyat (Salam Redaksi), Barqiyat (Surat pembaca), Kothorot (Editorial), Dirosat (Kajian Utama), Loqoat (lebih dekat/Tokoh), Waqofat (Peristiwa), Jalsat (berbagi), Ru'yat (Perspektif), Inikasat (Responsi), Dzikroyat (kenangan), Jaulat (perjalanan), Layaliyat (Semalam), Wahat (Oase), Alamiyat (Dunia Islam), Ruhaniyat (Nasehat Ruhani)

4. *Majalah Al-Iman Bin Ghoib; mengimani yang gaib sesuai syariat.*

Edisi 113 Tahun 4 Rabiul Akhir 1430h?30 April 2009 M. Harga: 7500-Rp.8000. Pimpinan Redaksi Hasan Basri, Lc. Alamat Redaksi Jln.Cipinang Baru Bunder N0. 3 RT.01/I Jakarta Timur. Telp. 021 4722375. email majalah_aliman@yahoo.co.id.

Materi Sajian: Salam Redaksi, Adab Kita, Doa ma'tsur, Kajian Utama, Konsultasi gangguan jin. Kiamat Pasti datang. Goib Mancanegara. Bongkar Jimat. Kristologi. Adab Mukmni ditimpa musibah

5. Majalah *Annida: Inspirasi tak Bertepi*

Penerbit PT.Insan Pratama 28 September 1998. Pimpinan Umum Dwi Septiadi Pimpinan Redaksi Muhammad Yulius. Alamat Redaksi: Jln. Mede No.42 Utan Kayu Jakarta Timur 13120. Website www.anida-online.com email: majalah_annida@ayhoo.com

Materi (Isi): *Sapa Nida*. Nida sayang. Bianglala. Seleb dan Buku. Aksara. Ekspresi. Mozaik. Film. Kisah sejati. Nostalgia. Inspirasi. Reportasis. Cerpen. Epik. Cerbung. Short Story. Serial. Galeri. Cerpen Interaktif. Cakrawala. Bengkel menulis Nida. Internid. Profil Penerbit. Perpus. Ensiklopedi. Muda. Jalan-jalan. Resensi. Info buku. Buku ;luar. Info Lomba. Kafe Nida. Kata Kamu. Tebak dong. Liputan. Best seller. DPB. Senyum Nida. Catcil

Majalah terbitan lokal atau kelompok studi juga menjadi bacaan mereka. Antara lain:

1. Buletin *Dawa'*, yang diterbitkan oleh aktivis mahasiswa Islam Kelompok Studi Kajian Islam di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang.
2. Lokomotif,

3. Genta dan bulitein al-Islam yang terbit setiap kali Jum'at dikeluarkan Hizbut Tahrir Sumatera Barat. Buletin ini memuat tentang isu Islam yang sedang hangat sesuai waktu terbitnya. Informasi tentang agenda, diskusi, seminar dan pertemuan kelompok mahasiswa aktivisi Islam.³⁸

³⁸Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang kerjasama dengan Balai Penelitian Dan Pengembangan Departemen Agama Jakarta 2010 (LITBANG) Penelitian tentang : *Pola bacaan Akivis Mahasiswa Islam*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Majalah Sabili lahir dari kebutuhan zaman yang mana awal kelahiran adalah bentuk perlawanan terhadap rezim dan wujud dakwah nilai-nilai Islam berubah menjadi majalah yang mengemas isu-isu populer seperti kehilangan identitas. Majalah Islam Sabili sebagai pers ilegal sekitar tahun 1985 sempat fakum beberapa waktu dan bangkit lagi tahun 1988 – 1993. Ini merupakan salah satu bentuk manifestasi bagi munculnya gerakan Islamisme baru Islam di Indonesia.

Sabili diawal dengan semangat kebersamaan dan kesederhanaan murni sebuah formulasi dari sebuah kelompok usroh (pengajian) yang dibungkus dalam kemasan jurnalistik untuk melawan media umum (yang bagi mereka dianggap jurnalis sekuler). Sabili didorong oleh semangat *revivalis* Islam ditahun 1980-an dalam konteks ke Indonesiaan. Dalam sebuah analisis *frame* Corak ideologi Majalah *Sabili* sebagai majalah Islam bersikap positif terhadap Islam dan Indonesia, dan negatif terhadap Amerika Serikat. Majalah *Sabili* memaknainya sebagai masalah kepentingan politik dalam ruang lingkup Islam

Semangat dengan perkembangan pemikiran keIslaman dengan kemelut pro dan kontra dengan pemerintahan orde baru. Dalam kelahiran di zaman yang berbeda dengan memakai sistim pemegang saham (PT Bina Sabili). Sabili di zaman yang serba terbuka seiring dengan kemenangan terhadap

rezim yang otoriter sangat memberi pengaruh terhadap perkembangan media pers di Indonesia. Modernisasi Sabili yang memiliki manajemen dan sistem perusahaan di era demokrasi yang terbuka untuk mengubah haluan dan format Sabili.

Dari segi semangat dan nilai dakwah masih dirasakan dipemberitaan Sabili di Orde Baru. Yang berbeda adalah konten berita yang lebih terbuka yang memaparkan isu Islam, politik, partai Islam, konflik Islam dan isu-isu nasional. Sabili sedikit membuka diri dengan investor dengan memakai perusahaan yang dinamakan PT Media Sabili.

Sabili dengan Partai Keadilan mempunyai hubungan historis, Sabili dan PK dari historis lahir dari rahim aktivis Islam gerakan dakwah. PK kemudian berubah nama Menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Pelopor yang dimaksudkan adalah ustad Rahmad Abdullah. Asumsi awal sebelum penelitian mengenai kecondongan Sabili pada PK terjawabkan dengan hubungan tersebut. Sabili mempunyai semangat dakwah yang sama tetapi antara Sabili dan PKS tidak mempunyai hubungan struktural. Sabili berdiri sendir sebagai media jurnalistik Islam dan PKS berdakwah melalui jalur politik. Didalam pemberitaan Sabili yang lebih dominan adalah partai Islam karena mempunyai nilai perjuangan yang sama sebagai *counter* pemberitaan terhadap pers umum (sekuler).

Di Zaman Pasca Reformasi Sabili sempat menjadi majalah Islam yang memiliki oplah tertinggi dan semakin diminati pembaca Islam sampai periode

tahun 2001 setelah itu Sabili sedikit menurun dengan perkembangan dunia Pers Islam dan segenap dinamika internal yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman Surjomihardjo, *Sejarah Pers Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2000)
- Akhmad, Zaini Abar, *Kisah Pers Indonesia 1966-1974*, (Yogyakarta: LKIS, 1995)
- Ali Fahry & Effendy Bahtiar, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde Baru*, (Bandung : Mizan 1992)
- Azis Thaba Abdul, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press 1996)
- C. Smith Edwar, *Pembredelan Pers Di Indonesia*, (Jakarta: PT Temprit, 1986)
- Erianto, *Analisis Framing, Kontruksi. Ideology, dan Politik* (Yogyakarta : LKiS, 2002)
- _____ *Ensiklopedi Islam* ,(Jakarta, PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994)
- Fred R. Von der Mehden, “ Malaysia dan Indonesia “, Shiren T. Hunter (ed) *Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001)
- Hendranaldi, “*Booming*” *Surat Kabar di Sumatera S Westkust*.(Yogyakarta: Ombak, 2008)
- Karim M. Rusli, *Negara dan Peminggiran Islam Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999)
- Maters Mirjam, *Dari Pemerintah Halus ke Tindakan Keras*. (Jakarta: Hasta Mitra-Pustaka Utan Kayu. 2003)

Syukur Abdul, *Gerakan Usroh Peristiwa Lampung Berdarah 1989* (Jakarta:Ombak, 2003)

Sulastomo, *Hari-Hari Yang Panjang Transisi Orde Lama Ke Orde Baru Sebuah Memoar*, (Jakarta: PT Kompas Nusantara, 2008)

Pratomo Yulianto Dwi, *Militer dan Kekuasaan: Puncak – Puncak Krisis Hubungan Sipil-Militer di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2005)

Zad Khamami, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia* Jakarta:Teraju,2002).

Majalah :

SABILI Edisi Perdana

SABILI, Profil Pers Islam No.05/Th. V 20 Oktober 1992 hal 45-46.

SABILI, Pers Islam Maju kena Mundur Kena, No.05/Th. V 20 Oktober-5 November 1992,hal: 37 – 38)

SABILI-Edisi Kebangkitan Th. VI 30 Juni 1998 M/3 Rabiul.Awal 1419 H hal 2-3

Majalah Kiblat, “ABIM Sebuah Model Gerakan Islam” dalam No./XXX edisi 20 April- 5 Mei 1983, hal. 29-31

Wawancara :

Wawancara dengan Zainal Muttaqin (Pendiri Sabili, Pemred 1988-2003 & Pemred 1998-2001) 24 September 2010)

Wawancara dengan Rifai Utapea (Wartawan Sabili 1998 s/d 2000 & Pemred 2010)
26 Agustus 2010

Wawancara dengan Zainal Muttaqin (L. 1963) pada 17 juli 2000 di Jakarta. Ia mantan Sekretaris Umum PII PW Jakarta Raya 1981-1983 dan aktivis kelompok tarbiyah generasi awal

INTERNET

Agus Muhamad, *PANTAU (kajian media dan jurnalisme) putri* Tahun II No 015-Juli 2001 home, jihad lewat tulisan kisah-kisah sukses majalah Sabili dengan beragam ironi Email: agusmuh67@yahoo.com

Komunikasi Politik dalam Pers Indonesia, Wednesday, 19 November 2008 06:22 http://www.um-pwr.ac.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=222:komunikasi-politik-dalam-p

Agung Pardini, *Makalah Majalah Islam Sabili (Media Revivalis Gerakan Tarbyiah 1988-1993)* <http://www.indopub.com>
<http://alamsyahdjafar.wordpress.com/2008/08/27>